



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 25);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor

Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II

KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
 - a. dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor tahun 2023 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi daerah;

- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu, dan antar pemangku kepentingan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 3

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- b. **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V : PENUTUP

BAB IV

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana kerja perangkat daerah;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah;
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Kecamatan Bogor Tengah;
11. Kecamatan Bogor Selatan;

- ee. Kecamatan Bogor Barat;
- ff. Kecamatan Bogor Utara;
- gg. Kecamatan Bogor Timur;
- hh. Kecamatan Tanah Sareal; dan
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2022

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA.


ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)
Pembina Tingkat I

NIP. 19800507 200312 1 003

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

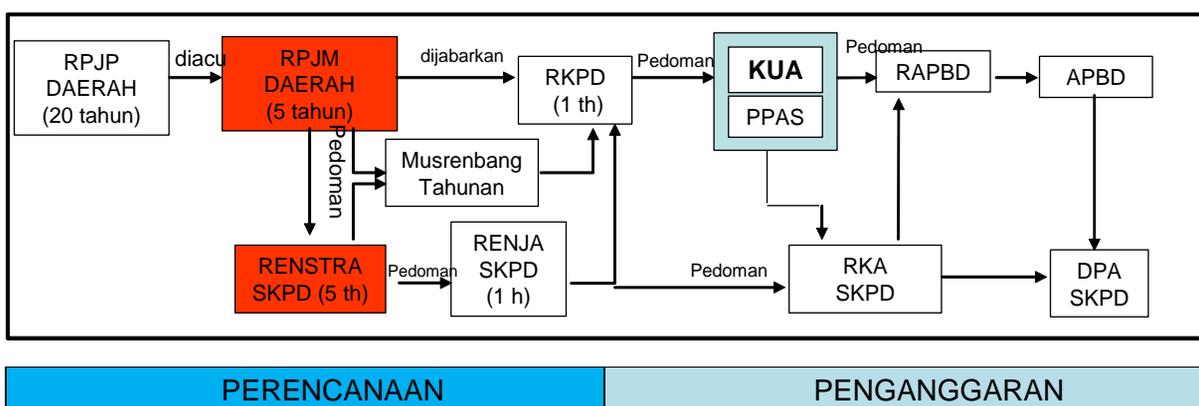
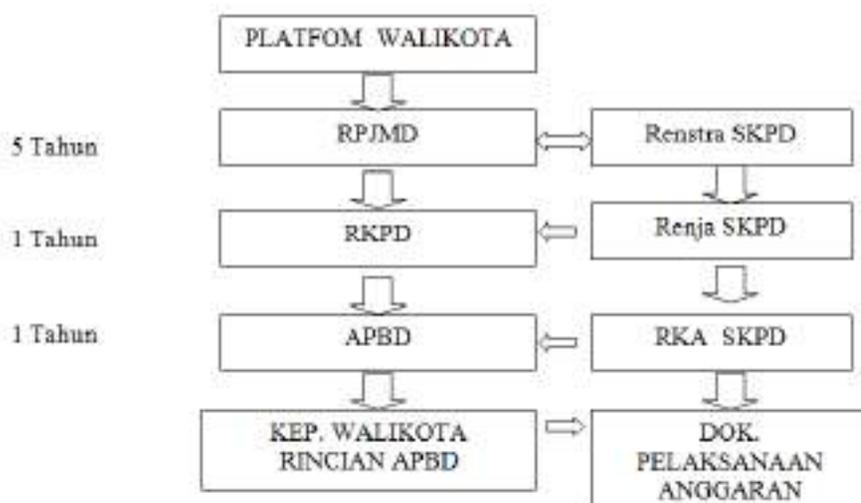
Desentralisasi pembangunan kesehatan bertujuan untuk melaksanakan percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan salah satu caranya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya-upaya program yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan ditunjang penggunaan sumber daya –sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Dinamika permasalahan kesehatan saat ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19, sehingga diperlukan data berdasarkan **evidence based** untuk mendukung pelaksanaan upaya program kesehatan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran tersebut dibutuhkan ketersediaan anggaran, data, dan informasi kesehatan yang akurat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan program. Harapannya dengan anggaran yang cukup serta data dan informasi yang akurat maka upaya-upaya program yang direncanakan betul-betul dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan Kota Bogor merencanakan rencana kerja tahunan sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan kondisi yang dinamis. Rencana Kerja Dinas Kesehatan memuat rumusan isu strategis pembangunan kesehatan, prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan anggaran kesehatan yang mengacu pada Reviu Renstra Kota Bogor, RKPD Kota Bogor, dan Renstra Dinas Kesehatan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja Dinas Kesehatan memuat rumusan isu strategis pembangunan kesehatan, prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan anggaran kesehatan yang senantiasa mengacu pada substansi yang tertuang dalam dokumen Renstra, baik yang berkenaan dengan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran hingga kebijakan, program, dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai pada Tahun anggaran 2023.

Bagan 1 Hubungan Rencana Kerja Tahunan SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja/RKT merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah serta permasalahan yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 159 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 159).
19. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan kesehatan di Kota Bogor.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana kerja ini adalah :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2019-2024.
2. Menetapkan Strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan serta program dan kegiatan tahun 2023.
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah dan menciptakan efisiensi, efektif dan berkeadilan serta berkelanjutan dalam alokasi sumberdaya pada pembangunan kesehatan di Kota Bogor.
4. Mewujudkan keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 2023 Dinas Kesehatan Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	2	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
BAB	3	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
	3.3	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
BAB	4	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB	5	PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Penanganan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui 5 program dan 23 kegiatan dengan alokasi anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun diluar APBD (merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan). Adapun, penjabaran program-program dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan untuk mendukung misi 1 dan 2 RPJMD Kota Bogor 2019-2024 yaitu mewujudkan kota bogor yang sehat dan mewujudkan kota bogor yang cerdas adalah sebagai berikut :

2.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan guna mendukung kegiatan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 6 (enam) sub kegiatan yang meliputi : 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, 2) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 3) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (BU DAK), 4) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi, 5) Pengadaan Obat, Vaksin, 6) Pengadaan Bahan Habis Pakai.

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya layanan kesehatan untuk menunjang kegiatan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bogor, melalui sub kegiatan : 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, 6) Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan pada Usia Produktif, 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana, 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, 15) Pengelolaan Pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga, 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, 17) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, 18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya, 19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan, 20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), 21) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, 22) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus, 23) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, 24) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, 25) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, 26) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, 27) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah, 28) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Kesehatan di suatu negara. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) apabila dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai penunjang untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi keadministrasian maupun memudahkan komunikasi.

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu agar dapat mempermudah alur pelayanan fasilitas kesehatan, terciptanya keterbukaan data dan informasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik lagi, melalui sub kegiatan : 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, 3) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet.

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

Kegiatan ini bertujuan agar terbina dan terkendalinya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan pemerintah dan swasta di Kota Bogor, sehingga terjadinya peningkatan mutu pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan, melalui sub kegiatan 1) peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, dan 2) penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan

Tabel 2.1 Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0.30	0.26	87%	Pelaksanaan kunjungan rumah dan intervensi lanjut selama masa pandemi Covid-19 terbatas sehingga berpengaruh pada capaian program IKS Kota Bogor, update data IKS per Puskesmas melalui aplikasi PIS-PK dari i belum dikelola dengan baik sehingga capaian IKS tiap bulannya sulit terpantau. Puskesmas hanya berfokus pada aplikasi KS sehingga tidak memiliki data manual. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pembinaan teknis kepada setiap pemegang PIS-PK di masing-masing puskesmas, melakukan monev, dan melakukan permohonan update aplikasi setiap bulan ke Pusdatin.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	84.75%	60%	70.8%	Belum terpenuhinya updating data aspak puskesmas. Upaya yang telah dilakukan yaitu memonitoring secara berkala
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di rehabilitasi	1 Puskesmas	1	100%	
	Jumlah Puskesmas pembantu yang di rehabilitasi	2 Pustu	2	100%	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen appraisal pengadaan tanah puskesmas	1 Dokumen	0	0%	Masih dalam tahap perencanaan penentuan lokasi tanah
	Pengadaan Genset	1 Unit	0	0%	Usulan tidak disetujui oleh Kemenkes
	Pengadaan Meubelair	2 Set	0	0%	Semua meubeler sudah difasilitasi oleh IPB dan BPKP
	Pengadaan Mobil PCR	1 Unit	1	100%	
	Pengadaan Mobil Promkes	1 Unit	0	0%	Harga mobil melebihi pagu anggaran
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (BU DAK)	Pengadaan Alat Kesehatan - Automatic Electronic Defibrillator	1 Unit	1	100%	
	Pengadaan Bio Safety Cabinet kelas II	1 Unit	1	100%	
	Pengadaan BOD Inkubator	1 Unit	1	100%	
	Pengadaan Conductivity meter	1 Unit	1	100%	
	Pengadaan Handspreyer Desinfektan	5 Unit	5	100%	
	Pengadaan Hepafilter	18 Buah	18	100%	
	Pengadaan Hot plate & stirrer	1 Unit	1	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Pengadaan Kompresor, Pressure pump	1 Unit	1	100%	
	Pengadaan Lansia Kit	10 Set	10	100%	
	Pengadaan Posyandu Kit	9 Set	9	100%	
	Pengadaan Set Kesehatan Gigi dan Mulut	5 Set	5	100%	
	Pengadaan Set Umum	5 Set	5	100%	
	Pengadaan Spektro UV VIS	1 Unit	1	100%	
	Pengadaan UKS Kit	9 Set	9	100%	
	Pengadaan Vaccine Carrier	22 Unit	0	0%	Mendapatkan hibah dari Provinsi
	Pengadaan Vaccine Refrigerator	3 Unit	0	0%	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terkalibrasinya centrifuge	5 Unit	5	100%	
	Terkalibrasinya doppler	1 buah	1	100%	
	Terkalibrasinya EKG	1 Unit	1	100%	
	Terkalibrasinya HB Meter	3 buah	3	100%	
	Terkalibrasinya Hygrometer	1 buah	1	100%	
	Terkalibrasinya inkubator	1 Unit	1	100%	
	Terkalibrasinya mikropipet	41 buah	41	100%	
	Terkalibrasinya mikroskop	1 Unit	1	100%	
	Terkalibrasinya Oxymeter	2 buah	2	100%	
	Terkalibrasinya photometer	2 unit	2	100%	
	Terkalibrasinya sterilisator	2 unit	2	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Terkalibrasinya suction pump	1 Unit	1	100%	
	Terkalibrasinya tensimeter	97 buah	97	100%	
	Terkalibrasinya termometer	13 buah	13	100%	
	Terkalibrasinya timbangan	78 buah	78	100%	
Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Ketersediaan jenis obat dengan tingkat kecukupan minimal 18 bulan	97%	99%	102.1%	
	Pemanfaatan aplikasi sistem e-logistik obat	1 Paket	1	100%	
	Terbinanya sarana toko alat kesehatan dan optikla	30 Sarana	30	100%	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya biaya penunjang layanan Laboratorium Kesehatan Daerah	1 paket	2	200%	
	Tersedianya Penunjang pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	1 paket	1	100%	
	Tersedianya penunjang pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan surveilans	1 paket	1	100%	
	Tersedianya reagen PCR	8064 Sample	800	9.9%	Adanya hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, BNPB dll
	Tersedianya reagen Rapid Covid-19	12295 tes	0	0%	Adanya peraturan terbaru yang menyatakan bahwa rapid antibodi tidak berlaku lagi sehingga tidak dilakukan pengadaan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Tersedianya Bahan Habis Pakai di Pusat Isolasi	1 paket	1	100%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Persentase Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan	100%	85.03	85.03	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya ibu hamil yang mengikuti kelas ibu	14%	14.86%	106%	
	Meningkatnya komplikasi kebidanan yang dideteksi dan ditangani (PKO)	76%	80.88%	106%	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	100%	96.7%	96.7%	Posyandu tutup selama pandemi Covid-19 sehingga ibu hamil harus ke puskesmas yang mana jaraknya cukup jauh dari rumah. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan sweeping door to door.
	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	69%	102.3%	67.4%	Banyaknya ibu hamil yang positif Covid-19 dan meninggal. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan promosi kesehatan kepada populasi beresiko, mengarahkan bumil untuk mendapatkan pelayanan di RS, melakukan skrining PCR untuk deteksi dini.
	Workshop pengenalan dan implementasi alat pantau kinerja jejaring rujukan (APKJR)	2 Rumah Sakit	2	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Closing Pendampingan Klinis Program EMAS	2 Rumah Sakit	2	100%	
	Jumlah fasilitas kesehatan swasta diintervensi EMAS	9 Faskes	7	77.8%	Pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam pelaksanaan intervensi EMAS pada fasilitas kesehatan swasta
	Kegiatan Pendampingan Klinis Program EMAS (P1, P2, P3)	2 Rumah Sakit	2	100%	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin (Pn)	100%	95%	94.9%	Pandemi Covid-19 menyebabkan pelayanan ibu hamil di posyandu tutup. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan sweeping door to door ibu hamil guna memantau kesehatan ibu hamil yang beresiko
	Meningkatnya puskesmas mampu pelayanan persalinan	80%	68	85%	Belum semua puskesmas mampu melakukan upaya pertolongan persalinan dikarenakan tidak adanya ruangan khusus bersalin
	Pertemuan Continuum Of Care	25 Rumah Sakit	25	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Diseminasi, Monev dan Desk Data program KIA	25 Puskesmas	25	100%
	Meningkatnya komplikasi bayi baru lahir yang dideteksi dan ditangani (PKN)	80%	77.02%	96.3%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KNL)	100%	99.73%	99.7%	
	Orientasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Bayi Baru Lahir pada masa Pandemi	25 Puskesmas	25	100%	
	Pertemuan Pengkajian AMP	3 Puskesmas	1	33.7%	Saat pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk dilakukan pertemuan AMP yang menghadirkan banyak tenaga ahli. Upaya yang telah dilakukan yaitu koordinasi dengan organisasi profesi, rumah sakit dan puskesmas untuk pelaksanaan AMP.
	Update manajemen asfiksia	25 Puskesmas	25	100%	
	Workshop penanganan kegawatdaruratan Neonatal	25 Puskesmas	25	100%	
	Rasio Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup	2,94 per 1000 KH	3.47	82.0%	Fasilitas NICU terbatas sehingga terapi yang diberikan kepada bayi tidak optimal. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan koordinasi yang lebih baik untuk rujukan.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Kelas Ibu Balita per kelurahan	4 Kelas	2	50%	Selama pandemi Covid-19 terdapat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Meningkatnya pelayanan kesehatan balita (Kunjungan balita)	100%	94.1%	94.1%	arahan untuk tidak melakukan kerumunan, oleh sebab itu kegiatan kelas ibu dan balita menjadi terhambat. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pemantauan melalui whatsapp group dan posyandu secara <i>mobile</i> atau kunjungan rumah.
	Meningkatnya puskesmas ramah anak	40%	60%	150%	
	Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita pada masa Pandemi	25 Puskesmas	25	100%	
	Orientasi Stimulasi deteksi dini tumbuh kembang balita Rumah Sakit dan Puskesmas	28 Faskes	28	100%	
	Penguatan Puskesmas Ramah Anak dan Mampu Pelayanan KTAP	25 Puskesmas	25	100%	
	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	2.87%	3.58%	75%	Fasilitas NICU terbatas sehingga terapi yang diberikan kepada bayi tidak optimal. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan orientasi SDIDTK kepada rumah sakit dan puskesmas, orientasi pelayanan kesehatan balita dimasa pandemi, dan penguatan puskesmas ramah anak dan KTAP

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	46.6%	46.6%	Selama pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, sehingga upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar terhambat. Upaya yang telah dilakukan yaitu membuat form penjangkaran siswa.
	Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 10	100%	80%	80%	
	Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 1 dan 7	100%	88%	88%	
	Meningkatnya siswa kelas 10 yang mendapat penjangkaran kesehatan	100%	38.15%	38.15%	
	Orientasi Pelayanan Kesehatan Anak Terlaksananya Usia Sekolah dan Remaja pada masa pandemi puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 1 dan 7	25 Puskesmas	25	100%	
	Rakor penjangkaran kesehatan anak sekolahn kesehatan pada usia pendidikan dasar	63 orang	63	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan kesehatan pada usia produktif*(SPM)	100	62.36%	62.36%	<ul style="list-style-type: none"> - Masa pandemi tenaga kesehatan tidak diperkenankan berkontak lama dengan sasaran sesuai dengan kebijakan PPKM di Kota Bogor, sehingga deteksi hanya dilakukan di dalam gedung kepada pasien maupun pengantar yang berkunjung ke Puskesmas. - Deteksi sesuai standard harus mencakup pemeriksaan Kadar Gula Darah. Pada tahun 2021, tidak ada alokasi pengadaan reagen untuk pemeriksaan Kadar Gula Darah. - Adapun usaha dan solusi pemecahan yang dilakukan adalah Penerbitan Surat Edaran Dinas Kesehatan tentang Pelaksanaan Deteksi FR PTM selama masa adaptasi kebiasaan baru dengan Nomor : 443/3014/VIII/P2P/2020, dan usaha pencatatan Faktor Risiko melalui pengisian Link Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular yang disebarkan kepada masyarakat usia produktif.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Tercapainya peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap petugas indera	25 Puskesmas	25	100%	
	Tersedianya aplikasi Pamong Walagri bagi ASN OPD	25 Puskesmas	25	100%	
	Tersedianya katalog meja atau lembar balik : Aku Sehat dari PTM (Hipertensi)	11 Buku	11	100%	
	Terselenggaranya Bimtek Surveillance PTM RS	21 Rumah Sakit	21	100%	
	Terselenggaranya kegiatan senam bersama	55 Kali	35	64%	Anggaran kegiatan senam hanya cukup untuk 35 kali.
	Terselenggaranya monev pelaporan kanker	25 Puskesmas	25	100%	
	Terselenggaranya Pengumpulan dan Verifikasi Data Surveilans Rumah Sakit dan Puskesmas dalam rangka mencegah komorbid terhadap COVID-19	46 Faskes	46	100%	
	Terselenggaranya percepatan pencapaian program IVA-CBE	25 Puskesmas	25	100%	
	Terselenggaranya percepatan pencapaian program kesehatan olahraga	25 Puskesmas	25	100%	
	Terselenggaranya Pertemuan dan Pembekalan Instrumen Bulan Deteksi PTM	25 Puskesmas	25	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Terselenggaranya Pertemuan Pemetaan Data Surveillance PTM	25 Puskesmas	25	100%	
	Terselenggaranya Pertemuan Verifikasi dan Analisis data Bulan Deteksi PTM	25 Puskesmas	25	100%	
	Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan Kanker bagi masyarakat khusus	25 Puskesmas	25	100%	
	Terselenggaranya Workshop Kesehatan Indera bagi Petugas Puskesmas	25 Puskesmas	25	100%	
	Terselenggaranya Workshop Rencana Strategis Pencapaian Kesehatan Essensial pada Usia Produktif dan PTM	1 Pertemuan	1	100%	
	Terselenggaranya Workshop Tatalaksana Asuhan Keperawatan pada Penyakit Tidak Menular	25 Puskesmas	25	100%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas Santun Lansia strata madya	7 puskesmas	9	129%	
	Meningkatnya Kelurahan memiliki Kelompok Pemberdayaan Lansia	50%	52.9%	105.9%	
	Meningkatnya Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	100%	
	Meningkatnya RW memiliki Posbindu	75%	77.8%	104%	
	Penguatan Program Kesehatan Lansia	25 Puskesmas	25	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Terlaksananya Monev dan Desk Data Program pelayanan kesehatan Ausrem dan lansia	50 orang	50	100%	
	Terlaksananya Orientasi petugas pembina posbindu lansia dan kelas pemberdayaan lansia	50 orang	50	100%	
	Terlaksananya Orientasi Pelayanan Kesehatan Lansia pada masa pandemi	25 Puskesmas	25	100%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (SPM)	100%	101.85%	101.85%	
	Tersedianya buku pedoman PTM	60 Buku	60	100%	
	Tersedianya katalog meja atau lembar balik : Aku sehat dari PTM (Hipertensi)	14 Buku	14	100%	
	Terselenggaranya evaluasi dan konsultasi berkala PTM	25 Puskesmas	0	0%	Refocusing anggaran
	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis PTM ke Puskesmas dan Posbindu PTM	30 kali	30	100%	
	Terselenggaranya kegiatan refreshing petugas UBM	25 Puskesmas	0	0%	Refocusing anggaran
	Terselenggaranya Workshop Penatalaksanaan Hipertensi dan Pencegahan Komplikasi Hipertensi di FKTP	25 Puskesmas	25	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Terselenggaranya workshop PTM	25 Puskesmas	25	100%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus*(SPM)	100%	104.45%	104.45%	
	Tersedianya brosur carta PTM	721 Lembar	721	100%	
	Tersedianya format pelaporan deteksi dini PTM	865 Lembar	865	100%	
	Tersedianya katalog meja atau lembar balik : Aku Sehat dari PTM (Diabetes Mellitus)	25 Buku	25	100%	
	Terselenggaranya Workshop Penatalaksanaan DM dan pencegahan komplikasi DM di FKTP	25 Puskesmas	25	100%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat *(SPM)	100%	76.34%	76.34%	SDM puskesmas terbatas, <i>home visit</i> harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dan adanya pasien yang pindah domisili maupun yang tidak datang ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan.
	Tersedianya Buku Pedoman DKJPS (Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial)	25 Buku	25	100%	
	Terselenggaranya Pemantapan Program Assertive Community Treatment (ACT)	12 Puskesmas	12	100%	
	Terselenggaranya Workshop Tatalaksana Penanganan ODGJ	25 Puskesmas	25	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Success Rate)	90%	72%	80%	Data belum diinput seluruhnya kedalam SITB. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu Melakukan koordinasi dengan faskes yang belum menginput data TB kedalam SITB.
	Programer TB yang mendapatkan Monev TB	41 Orang	41	100%	
	Programmer yang mendapatkan penguatan SITB	123 Orang	123	100%	
	Standar Pelayanan Minimal kasus TB yang dilayani sesuai standar	3220 Orang	4358	135%	
	Standar Pelayanan Minimal kasus terduga TB	17388 Orang	9568	55%	Masih pasifnya skrining terduga TBC. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu investigasi kontak ke indeks kasus.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pemeriksaan CD4	211 Test	143	68%	Belum semua ODHA baru diperiksa CD4, karena ada ODHA di luar Kota Bogor
	Pemeriksaan Pra ARV	94 Test	7	7%	Sudah tersedianya pemeriksaan Pra ARV di Seluruh Layanan PDP
	Pemeriksaan VL	85 Test	72	85%	Adanya bantuan pemeriksaan VL dari GF dan GHSC
	Penguatan SIHA	34 Fasyankes	34	100%	
	Pertemuan Evaluasi Layanan PDP	75 Orang	50	66.7%	Tidak semua peserta hadir dalam pertemuan ini

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Pertemuan Sinkronisasi Data HIV, TB, Ibu Hamil	85 Orang	54	63.5%	Tidak semua peserta hadir dalam pertemuan ini
	Pertemuan Triple Eliminasi pada Ibu Hamil	90 Orang	54	60%	Masih ada peserta yang tidak hadir
	Prevalensi HIV <0.5	0.5%	0.44%	112%	
	Rapat Kerja Jejaring Program HIV/AIDS dan IMS	55 Orang	29	52.73%	Masih ada peserta lintas sektor yang tidak hadir (terkait disposisi)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kegiatan pelayanan yang mendapatkan pelayanan dan penanganan P3K, bencana, antisipasi bencana, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru serta kegiatan khusus lainnya	200 Kegiatan	200	100%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini	10.156 Bayi	16631	163.8%	
	Jumlah ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	19.205 Bumil	18468	96.2%	Ibu hamil belum semua mendapatkan TTD. Upaya yang sudah dilakukan yaitu melaksanakan MOYAN SEHAT (Mobile Posyandu SEHAT)
	Jumlah remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah	28.880 Rematri	28952	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Pelaksanaan Pembinaan kader pembangunan manusia	5 Kegiatan	1	20%	Adanya PPKM menyebabkan kegiatan pembinaan kader pembangunan manusia menjadi terbatas. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu tetap melakukan pembinaan kader saat di wilayah walaupun tidak dalam pertemuan khusus
	Pelaksanaan Pemetaan dan Analisis Situasi program stunting	2 Kegiatan	2	100%	
	Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan	2 Kegiatan	0	0%	Dana pencatatan & pelaporan tidak terserap, dikarenakan Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara online melalui E-PPGBM.
	Pelaksanaan pengukuran dan publikasi stunting	5 Kegiatan	1	20%	Adanya pembatasan selama PPKM sehingga tidak semua kegiatan dapat terlaksana. Solusi adalah melakukan pengukuran melalui inovasi Moyan Sehat
	Pelaksanaan Rembuk Stunting	1 Kegiatan	1	100%	
	Pelaksanaan reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting	2 Kegiatan	0	0%	Adanya PPKM menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Adapun reviu dilakukan secara daring.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	4.31%	4.77%	89%	Posyandu tidak buka selama masa pandemi, sehingga pemantauan terhadap balita terhambat. Selain itu, terjadinya penurunan ekonomi pada keluarga.
	Persentase Balita kurus Mendapat PMT	92%	100%	108.7%	
	Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)	1.86%	3.89%	-9%	Masa pandemi menyebabkan balita terdampak WASTING. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu pemberian PMT, Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak, Kelas ASI, Kelas Gizi.
	Persentase Balita sangat kurus Mendapat PMT	100%	100%	100%	
	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	4.70%	5.33%	86%	Masa pandemi menyebabkan balita terdampak stunting. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu Konvergensi Stunting 8 aksi, Pemberian PMT, Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak, Kelas ASI, Kelas Gizi
	Persentase bayi mendapat ASI Eksklusif	52%	74.1%	142.6%	
	Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia	8.20%	8.5%	96%	Anemia terjadi karena pernikahan dini, asupan gizi ibu hamil yang kurang, daya beli

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
					makanan berkurang. Upaya yang telah dilakukan yaitu pemberian TTD Bumil 90 Tablet
	Persentase Ibu Hamil Dengan KEK	3.67%	4.8%	69%	KEK terjadi karena pernikahan dini, asupan gizi ibu hamil yang kurang, daya beli makanan berkurang. Upaya yang telah dilakukan yaitu PMT Bumil KEK dan kegiatan Kelas Ibu Hamil.
	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan	100%	100%	100%	
Pengelolaan Pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelatihan Kader Pos UKK	50 Orang	0	0%	Refocusing Anggaran
	Pemeriksaan Kesehatan bagi Pengemudi	200 Orang	0	0%	Adanya himbauan dari pemerintah terkait larangan mudik, sehingga kegiatan laju transportasi tidak banyak yg beroperasi. Selain itu anggaran difokuskan untuk kegiatan Covid dan Vaksinasi
	Persentase perusahaan formal yang melaksanakan yankesja	50%	100%	200%	
	Persentase Puskesmas yang membina Pos Upaya Kesehatan Kerja	40%	52%	130%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Monev percepatan ODF tingkat kecamatan	1 Pertemuan	1	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Monev percepatan ODF tingkat kota	1 Pertemuan	1	100%	
	Pemeriksaan kualitas air minum ((Kesling)	233 Sampel	233	100%	
	Pemeriksaan kualitas air minum pusat isolasi	7 Sampel	5	71.43%	Kebutuhan pemeriksaan menyesuaikan dengan keberadaan jumlah pasien yang dirawat di pusat isolasi . Pada tiga bulan terakhir tahun 2021 terjadi penurunan kasus Covid-19 sehingga tidak dilakukan pengambilan sampel.
	Pemeriksaan kualitas makanan pusat isolasi	8 Sampel	4	50%	
	Pendampingan percepatan ODF	46 Kelurahan	46	100%	
	Pengadaan alat, instalasi pengelolaan limbah medis/B3 pusat isolasi	1 Lokasi	1	100%	
	Pengelolaan limbah medis/B3 pusat isolasi	11540 Kg	24375	43.1%	Jumlah pasien yang dirawat mengalami penurunan sehingga jumlah limbah medis yang dihasilkan juga berkurang.
	Pengelolaan limbah medis/B3 vaksinasi massal	81830 Kg	12011.5	34.3%	Penggunaan BHP (Bahan Habis Pakai) dan vaksin menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan vaksinasi yang melibatkan jumlah tim vaksinator, sasaran, dan frekuensi pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di sentra, fasyankes, dan wilayah.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Penguatan komitmen lintas sektor dalam rangka percepatan ODF tingkat kecamatan	1 Pertemuan	1	100%	
	Penguatan komitmen lintas sektor dalam rangka percepatan ODF tingkat kota	1 Pertemuan	1	100%	
	Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka pengelolaan limbah medis	2 Pertemuan	2	100%	
	Persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan air minum yang memenuhi syarat*(12 IKS,SDGs)	99%	98.9%	99.9%	Masih ada masyarakat yang menggunakan sarana air minum yang belum memenuhi syarat kesehatan seperti jarak sumber air dengan sumber pencemaran, konstruksi sarana yang tidak memenuhi syarat kesehatan
	Pertemuan pemuktahiran data sanitasi	1 Pertemuan	1	100%	
	Persentase Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat*(12 IKS,SDGs)	79%	76.34%	96.6%	Masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan atau belum mengakses sarana jamban yang memenuhi syarat kesehatan seperti jamban yang dilengkapi dengan sarana septic tank.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	20%	0.96%	4.8%	Masih kurangnya pemahaman dan komitmen OPD / instansi pemerintah mengenai program Germas, peran dan fungsi masing-masing terhadap program Germas, Sebagian besar OPD / instansi pemerintah belum memiliki kebijakan terkait Germas dari masing-masing pimpinan OPD.
	Tersedianya form Germas dan AKB	13 Buku	13	100%	
	Tersedianya stiker aneka tema kesehatan	3430 Lembar	3430	100%	
	Tersedianya X Banner	150 Set	150	100%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah penyehat tradisional yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	145 Orang	96	66.2%	Pergantian Programer Kestrad di setiap Puskesmas. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan evaluasi terhadap Laporan Triwulan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Tersedianya Alat Pelindung diri untuk penanganan Covid-19	1 Paket	1	100%	
	Tersedianya Media KIE Covid-19	50 Buah	50	100%	
	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Tracking Covid-19	30 Orang	42	140%	
	Terselenggaranya Penguatan Tim Detektif Covid-19	20 Orang	40	200%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Terselenggaranya Refreshing tim swab bagi layanan kesehatan	20 Orang	45	225%	
	Terselenggaranya Refreshing Tracking atau lacak pantau Puskesmas	30 Orang	34	113%	
	Terselenggaranya Tindak Lanjut Tracking Covid-19 Lintas Sektor	30 Orang	50	167%	
	Terselenggaranya Tracking atau Lacak Pantau Kelurahan	35 Orang	62	177%	
	Tertanganinya kasus KLB Penyakit Menular	100%	100%	100%	
	Update dan Pelaporan Cakupan Imunisasi Di Wilayah Kota Bogor melalui Pengembangan Website P3MS	1 Sistem	1	100%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pelayanan penderita Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) di puskesmas	80%	19.9%	24.9%	Jumlah pasien yang datang ke puskesmas selama pandemi berkurang, sehingga jumlah penderita ODMK yang dilayani pun sedikit.
	Tersedianya Buku PPDGJ III	21 Buku	21	100%	
	Terselenggaranya kegiatan Diseminasi Program Kesehatan Jiwa	25 Puskesmas	25	100%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Sekolah yang dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan sosialisasi pencegahan NAPZA	40%	16%	40%	Pandemi menyebabkan sekolah tidak melaksanakan kegiatan PTM, sehingga beberapa sekolah terhambat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
					dalam menyelenggarakan kegiatan keswa dan NAPZA. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu melaksanakan peningkatan kapasitas SDM bagi nakes dalam upaya pelaksanaan kegiatan keswa NAPZA di sekolah.
	Tersedianya brosur/leaflet : Pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA	665 Lembar	665	100%	
	Terselenggaranya Sosialisasi faktor risiko PTM, keswa dan NAPZA di masyarakat umum dan masyarakat khusus	0	0	0%	Refocusing Tahun 2021, sehingga kegiatan tidak dapat diselenggarakan.
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas dengan IKS >0,25	6 Puskesmas	12	200%	
	Jemaah Haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan Haji	949 Jemaah	954	100.53%	
	Jumlah puskesmas dengan manajemen baik	15 Puskesmas	15	100%	
	Jumlah puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan Rumah Sakit	5 Puskesmas	9	180%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	3400 Orang	3054	89.82%	Tidak semua puskesmas mencapai target kunjungan BAS. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pembinaan teknis ke Puskesmas.
	Programer Haji Puskesmas yang mendapatkan monev haji	9 Orang	9	100%	
	Programer Rawat Inap yang mendapatkan monev Rawat Inap	7 Orang	7	100%	
	Puskesmas yang mendapatkan monev BAS, PIS PK, LAB, Perkesmas	25 Puskesmas	25	100%	
	Radiografer Puskesmas yang mendapatkan monev Radiologi	9 Orang	9	100%	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Posbindu yang terintegrasi PTM	85%	85.3%	100%	
	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Program Pemyakit Menular	25 Puskesmas	25	100%	
	Terlaksananya Penyelidikan Epedemiologi, pelacakan kasus, rumor, penanggulangan dan surveilans penyakit berpotensi KLB	10 Kasus	12	120%	
	Tersedianya data surveillance PTM di Rumah Sakit	20 Rumah Sakit	20	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Terselenggaranya bimbingan teknis surveillance PTM	20 Rumah Sakit	0	0%	Refocusing anggaran
	Terselenggaranya Koordinasi Terpadu Lintas Sektor	36 OPD	36	100%	
	Terselenggaranya Monev DKJPS	25 Puskesmas	0	0%	Refocusing anggaran
	Terselenggaranya Pembentukan kader Penyakit Menular	33 Kader	33	100%	
	Terselenggaranya Percepatan Pencapaian Program PTM	25 Puskesmas	25	100%	
	Terselenggaranya Rapat Persiapan Penyusunan Instrumen DKJPS	25 Puskesmas	0	0%	Refocusing anggaran
	Terselenggaranya Workshop Indera	25 Puskesmas	0	0%	Refocusing anggaran
	Terselenggaranya Workshop Penyakit Degeneratif/ Pernapasan/ Imunologi/ Kanker dan kelainan darah	25 Puskesmas	0	0%	Refocusing anggaran
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan	100%	96%	96%	- Adanya penonaktifan PBI APBD hasil sanding data pindah dan meninggal dengan data disdukcapil - Adanya penonaktifan oleh pusat terkait validitas data - Adanya penonaktifan dari hasil verifikasi dan validasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor - penonaktifan
	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional *(12 IKS)	97%	90.46%	93.26%	
	Persentase pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor (sumber APBD murni 60% total tagihan)	100%	98.44%	98.44%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
					langsung dari BPJS karena meninggal dan pindah kepesertaan
	Persentase pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor (sumber Bankeu Prov 40% total tagihan)	100%	100%	100%	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pemutahiran data STBM	25 Puskesmas	25	100%	
	Pendampingan STBM	68 Kelurahan	68	100%	
	Persentase keluarga yang mengakses sanitasi layak	74%	76.34%	103.2%	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	57 Faskes	47	82.5%	Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa selama pandemi kegiatan survey akreditasi ditunda.
	Jumlah klinik pratama yang terakreditasi	12 Klinik	4	33%	
	Jumlah Puskesmas terakreditasi Paripurna	4 Puskesmas	2	50%	
	Jumlah rumah sakit yang terakreditasi	20 Rumah Sakit	18	90%	
	Monev Mutu dan Akreditasi Puskesmas	12 Puskesmas	25	208%	
	Pembinaan Mutu Internal Puskesmas	5 Puskesmas	5	100%	
	Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal Puskesmas	12 Puskesmas	0	0%	Surat Edaran dari Kemenkes yang menyatakan bahwa selama pandemi kegiatan survey akreditasi ditunda.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Workshop Pendukung Implementasi Re-Akreditasi Puskesmas	11 Puskesmas	25	227.3%	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wajah	Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)	62%	47%	124.2%	
	Cakupan Anak Usia Sekolah Dasar yang mendapat imunisasi	98%	108.9%	111.2%	
	Cakupan Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	95%	84.3%	88.7%	Belum dibukanya posyandu selama pandemi Covid-19
	Fogging Fokus	100 kali	8	8%	Selama pandemi Covid-19, dilakukan pembatasan kegiatan fogging
	Kelurahan yang mencapai UCI	68 Kelurahan	30	44.12%	Selama pandemi Covid-19, terbatasnya pelaksanaan posyandu
	Monitoring dan Evaluasi Penyakit Menular	4 Kali	3	75%	Refocusing anggaran sehingga hanya bisa melakukan monev sebanyak 3 kali
	Pemusnahan Limbah Medis	6000 Kg	3122	52%	Kasus Covid menurun sehingga kegiatan swab berkurang dan limbah medis yang dihasilkan berkurang
	Sosialisasi Imunisasi BIAS	1 Kali	1	100%	
	Terlaksananya pembayaran honor pendamping vaksinasi	1100 Orang	1082	98.36%	
	Terlaksananya pembayaran honor vaksinator Dokter ASN dan Non ASN	3780 Nakes	3376	89.31%	Target yang dicantumkan bukan yang terbaru dan tidak digabungkan dengan akselerasi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Terlaksananya pembayaran honor vaksinator Perawat/Bidan ASN dan Non ASN	5670 Orang	3795	66.93%	Target yang dicantumkan bukan yang terbaru dan tidak digabungkan dengan akselerasi
	Terlaksananya pembayaran honor vaksinator Tenaga Pendukung Dinkes ASN dan Non ASN / Non Dinkes Non ASN	15120 Orang	15786	104.4%	Target yang dicantumkan bukan yang terbaru dan tidak digabungkan dengan akselerasi
	Terlaksananya pembayaran Legal Asisten jasa pertimbangan hukum dari kejaksaan negeri	120 Orang	0	0%	Untuk jasa pegawai Kota Bogor sudah ada tunjangan
	terlaksananya pemeriksaan test PCR	9936 Sampel	656	6.6%	Terjadi penurunan kasus sehingga sampel yang diperiksa berkurang, dan Labkesda serta RSUD sudah dapat melakukan pemeriksaan PCR
	Terlaksananya pengadaan kursi untuk kegiatan vaksinasi massal	1000 Buah	1000 buah	100%	
	Terlaksananya sewa tenda pada pelaksanaan vaksinasi massal	2500 Meter	0	0%	Pelaksanaan Vaksinasi sudah difasilitasi di sentra besar (Mall , dll)
	Terlaksananya pembayaran honor tim tracking	8 Bulan	8 bulan	100%	
	Tersedianya Honor Pokja KIPi	330 Orang	330	100%	
	Tersedianya jasa telepon	4 Bulan	0	0%	Sudah dialihkan untuk kuota tracer
	Tersediany cetak kartu kendali vaksinasi covid-19	1464 Buku	1464	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PSC Gesit 119 Kota Bogor	7 Puskesmas	25	357.14%	
	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam	31%	91.53%	295.26%	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health	75%	95.6%	127%	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menggunakan e-profil aktif	21 Puskesmas	0	0%	E-profil merupakan aplikasi yang dibuat oleh dinkes Provinsi, selama tahun 2020 dan 2021 aplikasi tersebut dalam proses perbaikan, sehingga belum bisa digunakan.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menggunakan SIMPUS aktif	22 Puskesmas	22	100%	
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Puskesmas yang menggunakan ASDK (Aplikasi Satu Data Kesehatan) Aktif	6 Puskesmas	0	0%	ASDK belum digunakan di Puskesmas karena perubahan SDM di Puskesmas, dan aplikasi sedang dalam perbaikan dari Kemenkes, sehingga perlu dilakukan refreshing petugas kembali.
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	82%	81.24%	99.1%	a. kurangnya sdm untuk melakukan monitoring evaluasi b. beberapa sarana kesehatan belum memenuhi syarat sesuai peraturan menteri kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang berijin	100%	100%	100%	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan di Fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan klinik utama)	81%	100%	123.5%	

2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar, melalui sub kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan.
2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan, melalui sub kegiatan 1) perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan, 2) pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, serta 3) pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.
3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kinerja SDM Kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara prima, melalui sub kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.2 Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	84%	89.7%	107%	
	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	90%	0	0%	Selama pandemi Covid-19 tidak ada kegiatan Uji Kompetensi

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	84%	97.4%	116%	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)	84%	89.7%	107%	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya Kegiatan Pendataan STR (Surat Tanda Registrasi)	1 Kegiatan	1	100%	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Dibutuhkan Sesuai dengan Dokumen	73%	28%	39%	Alokasi anggaran untuk kebutuhan dan pendayagunaan SDM hanya cukup untuk 79 orang
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Perencanaan Kebutuhan SDM	26 UPT	26	100%	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terbinanya Pegawai PKWT	79 Orang	77	97%	PKWT yang terekrut berjumlah 77 Orang, yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran untuk 1 dokter dan 1 perawat
	Terpenuhinya Gaji Pegawai PKWT	79 Orang	77	97%	
	Terpenuhinya Insentif dan Gaji pada Pusat Isolasi	29 Orang	49	169%	
	Terpenuhinya Insentif Tenaga Kesehatan RSUD	3 Bulan	3	100%	
	Terpenuhinya Insentif Tenaga Kesehatan UPT	26 UPT	26	100%	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Fasyankes yang Melaksanakan Update Data SISDMK	85 Fasyankes	89	105%	
	Puskesmas yang Menyusun Analisis Kebutuhan Diklat	25 Puskesmas	25	100%	
	Puskesmas yang Menyusun Anjab ABK	25 Puskesmas	25	100%	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi	262 SDM	242	92%	Belum semua tenaga bisa mendapatkan pengembangan kompetensi. Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan yang akan diikuti dibatalkan oleh penyelenggara.

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapat Penghargaan	27 Nakes	0	0%	Refocusing anggaran
	Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi (pelatihan)	61 Orang	62	102%	

2.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

1. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan produsen PKRT tentang pengolahan produk perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) sesuai aturan dan agar terbinanya dan terkendalinya sarana produksi dan retail, melalui sub kegiatan : 1) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga, 2) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga

2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Kegiatan ini bertujuan agar dapat meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan industri rumah tangga yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan (KIE Keamanan Pangan), dan terpenuhi persyaratan higienis, sanitasi dan dokumentasi, melalui sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.

3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah TPM dan DAM yang memiliki sertifikat laik hygiene sehingga terjaminnya kebersihan dan keamanan produk hasil olahan TPM dan DAM, melalui sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat

pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM).

4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya jumlah unit usaha makanan jajanan yang memenuhi syarat, terlaksananya kegiatan pemeriksaan sampel makanan maupun jasa bogor, meningkatnya jumlah PMJ dan sentra berstiker yang dibina, melalui sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan.

5. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya jumlah usaha produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang diperiksa, terpenuhi persyaratan kesehatan dan label dari produk, dan tersedianya informasi terkini terkait hasil pengawasan perizinan industri rumah tangga, melalui sub kegiatan pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan dan penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga.

Tabel 2.3 Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Produsen Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	100%	64%	64%	Banyaknya sarana yang tidak memenuhi syarat sertifikasi. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pembinaan.
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Usaha produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang bersertifikat	16 PKRT	1	6.3%	Banyaknya sarana yang tidak memenuhi syarat sertifikasi, upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pembinaan.
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Usaha produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang bersertifikat	16 PKRT	1	6.3%	Banyaknya sarana yang tidak memenuhi syarat sertifikasi, upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pembinaan.

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan RuTa	Jumlah sarana produksi dan retail yang dibina	60 sarana	2	3.3%	Banyaknya sarana yang tidak memenuhi syarat sertifikasi, upaya yang dilakukan yaitu melakukan pembinaan.
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat	90%	64%	71%	Banyaknya sarana yang tidak memenuhi syarat sertifikasi, upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pembinaan.
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Meningkatkan keamanan dan mutu produk PIRT yang beredar sehingga bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional	75 IRTP	75	100%	
	Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas kefarmasian	90 Orang	67	74.44%	Peserta yang telah diundang tidak menghadiri kegiatan
	Meningkatnya Pengawasan Post Market terhadap produk makanan dan minuman yang beredar	50 Produk	43	86%	Anggaran pengujian sampel sudah habis untuk menguji 36 sampel
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan (KIE Keamanan Pangan)	210 Orang	210	100%	
	terpenuhinya standar persyaratan perizinan apotek, toko obat dan UMOT	50 Sarana	57	114%	
	Terpenuhi persyaratan higienis, sanitasi dan dokumentasi	175 Sarana	112	64%	Banyaknya sarana yang tidak memenuhi syarat sertifikasi, upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pembinaan.
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM dan DAM yang memiliki sertifikat laik hygiene	60%	74.7%	124%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa	Pelatihan bagi Karyawan Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, DAM	150 Orang	0	0%	Refocusing Anggaran
	Penerbitan sertifikat laik sehat bagi jasa boga	50 Jasa boga	5	10%	masih banyak para jasa boga yang belum aktif karena PSBB

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan sertifikat laik sehat bagi Rumah Makan /restoran	50 Rumah makan	10	20%	banyak restoran yang masih tutup belum aktif kembali
	Penerbitan sertifikat Laik sehat Depot Air Minum	50 DAM	0	0%	masih banyak yang belum tidak mengurus karena covid
	Persentase TPM yang memiliki sertifikat laik hygiene yang dibina	60%	5%	8%	anggaran masuk kedalam refocusing
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan	52%	0	0%	Refocusing Anggaran
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah unit usaha makanan jajanan yang memenuhi syarat	50 Usaha	0	0%	Refocusing Anggaran
	Pemeriksaan Sampel Makanan, Jasa Boga	50 Sampel	0	0%	Refocusing Anggaran
	Penerbitan Stiker Laik Sehat	500 Lembar	0	0%	Refocusing Anggaran
	Persentase PMJ dan Sentra berstiker yang dibina	52%	0	0%	Refocusing Anggaran
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	10 Sarana	10	100%	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terpenuhi persyaratan kesehatan dan label dari produk	130 Produk	130	100%	
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Tersedianya informasi terkini terkait hasil pengawasan perizinan industri rumah tangga	25 Laporan	25	100%	

2.1.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya sinergisitas dari berbagai pihak agar dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat sehat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terkhususnya di Kota Bogor melalui sub kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya kegiatan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat di Kota Bogor sehingga dapat mewujudkan masyarakat sehat, melalui sub kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan agar dapat meningkatkan strata Kelurahan Siaga Aktif, meningkatkan strata Posbindu, meningkatkan strata Posyandu, dan agar dapat meningkatkan peran serta dan peran aktif RW siaga terutama dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19, termasuk pengawasan kegiatan warga di lingkup RW, melalui sub kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

Tabel 2.4 Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Predikat Kota Sehat	swastisa ba	Belum mencapai predikat kota sehat	Belum mencapai predikat kota sehat	Persyaratan belum terpenuhi indikator 60 % Kelurahan ODF belum terpenuhi (belum ada kelurahan ODF) jadi tidak bisa masuk penilaian
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	20%	0.96%	5%	- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen OPD / instansi pemerintah mengenai program Germas, - Masih kurangnya pemahaman OPD / instansi pemerintah mengenai peran dan fungsi masing- masing terhadap program Germas, - Sebagian besar OPD / instansi pemerintah belum memiliki kebijakan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
					terkait Germas dari masing-masing pimpinan OPD.
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Intervensi promosi kesehatan dengan Germas di berbagai tatanan (pesantren, sekolah, kampus, promkes RS, tempat umum/ ibadah, dll) (BOK)	2 Kegiatan	2	100%	
	Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan	5 Dokumen	6	120%	
	Kampanye Masif perubahan Perilaku masyarakat di berbagai tatanan (BOK)	3 Kegiatan	3	100%	
	Kemitraan / Jejaring Kerja dengan organisasi kepemudaan/Ormas dalam mendukung implementasi program-program kesehatan lainnya (BOK)	1 Kegiatan	1	100%	
	Monitoring dan Evaluasi / Monev PKRS ke RS di Kota Bogor (BOK)	10 Kegiatan	10	100%	
	Monitoring dan evaluasi penerapan KTR di angkutan kota	1 Kegiatan	1	100%	
	Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan Puskesmas (BOK)	25 Kegiatan	0	0%	Tidak terserapnya kegiatan Monev Promkes Puskesmas (BOK) dikarenakan kegiatan monev promkes sudah diintegrasikan dengan kegiatan Koordinasi Petugas Promkes Puskesmas terkait Program-Program Inovasi Kesehatan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Monitoring dan FGD dalam rangka pembinaan satgas internal di berbagai kawasan	1 Kegiatan	0	0%	Recofusing Anggaran
	Optimalisasi peran Saka Bhakti Husada Kota Bogor	1 Kegiatan	1	100%	
	Orientasi Promosi Kesehatan dalam upaya pencegahan Stunting (BOK)	1 Kegiatan	1	100%	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan KTR di 8 kawasan	1 Kegiatan	1	100%	
	Pembinaan dan pendampingan Saka Bhakti Husada	4 Kegiatan	4	100%	
	Penguatan Kelompok Germas Masyarakat dengan Saka Bhakti Husada (BOK)	3 Kegiatan	3	100%	
	Persentase institusi yang telah memiliki satgas KTR internal	39%	71.4%	183.2%	
	Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR	77%	76.05%	98.8%	Kurang optimalnya peran dari masing-masing OPD secara mandiri melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum kepada kawasan yang menjadi wewenangnya, Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda KTR No 10 tahun 2018 dan bahaya merokok bagi orang lain sehingga masih banyak masyarakat

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
					yang sulit diarahkan / ditegur dan tetap merokok di area KTR, serta penerapan sanksi Perda KTR yang belum optimal
	Pertemuan Advokasi dan Koordinasi kemitraan/ jejaring kerja dengan sektoral dan mitra potensial mendukung gemas, program kesehatan lainnya (BOK)	1 Kegiatan	1	100%	
	Pertemuan Koordinasi Petugas Promkes Puskesmas terkait Program-Program Inovasi Kesehatan (BOK)	2 Kegiatan	2	100%	
	Rapat koordinasi Penguatan wilayah dalam mendukung program kesehatan Gemas (BOK)	1 Kegiatan	1	100%	
	Tersedianya bantuan sarana posyandu di lokasi lomba	5 Lokasi	3	60%	Adanya refocusing anggaran sehingga hanya dapat dilaksanakan di 3 lokasi lomba.
	Tersedianya form money KTR di 8 kawasan	30 Buku	30	100%	
	Tersedianya form money KTR di angkutan umum	30 Buku	30	100%	
	Tersedianya form sidak KTR	5 Buku	5	100%	
	Tersedianya stiker KTR di 8 kawasan	1505 Buah	1505	100%	
	Tersedianya stiker KTR di angkutan umum	1505 Buah	1505	100%	
	Tersedianya stiker KTR di warung	300 Buah	300	100%	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan	20%	0.96%	4.8%	Tahun 2021 hanya satu OPD saja yg melaksanakan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Hidup Sehat				Germas. Upaya yang telah dilakukan yaitu peningkatan sosialisasi Germas ke OPD dan tatanan yang menjadi binaannya.
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kampanye PHBS, Germas, Covid-19 dan Program Kesehatan Lainnya	2 Kali	2	100%	
	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan GERMAS di TK.Kota (BOK)	15 Kegiatan	15	100%	
	Pelayanan Mobil Curhat (BOK)	4 Kegiatan	4	100%	
	Pembentukan & Pengembangan Kampung Germas (BOK)	5 Kegiatan	5	100%	
	Pengadaan Media (BOK)	1 Paket	1	100%	
	Penguatan Germas dilingkungan Sekolah (BOK)	5 Kegiatan	5	100%	
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi implementasi GERMAS di Tk.Kota (BOK)	1 Kegiatan	1	100%	
	Sosialisasi dan Implementasi Germas disemua tatanan dengan OPD Pembina (BOK)	1 Kegiatan	1	100%	
	Sosialisasi dan Implementasi Germas OPD pembina dengan institusi binaannya (BOK)	4 Kegiatan	4	100%	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (persentase rumah tangga ber-PHBS)	69%	69.27%	100%	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu Purnama Mandiri	87.7%	94.9%	108.2%	
	Persentase RW Siaga Aktif	50%	99.4%	198.7%	
	Persentase UKBM lain berstrata Madya	6%	11.7%	194.3%	
	Tersedianya BOP RW Siaga Covid-19	9.564 OB	9373	98%	Ada RW Siaga Covid yang tidak membuat laporan kegiatan sehingga tidak melakukan penyerap an anggaran.
	Tersedianya jasa tenaga kesehatan kader kelurahan siaga	4.896 OB	4896	100%	
	Tersedianya jasa tenaga kesehatan kader posbindu	32.616 OB	32616	100%	
	Tersedianya jasa tenaga kesehatan kader posyandu	63.840 OB	63840	100%	

2.1.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya kegiatan perencanaan dan penganggaran guna mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor serta terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja sebagai bahan evaluasi perbaikan di tahun berikutnya, melalui sub kegiatan : 1) penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, 2) koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung urusan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor, melalui sub kegiatan 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, melalui sub kegiatan : 1) penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, 2) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, 3) penyediaan peralatan rumah tangga, 4) penyediaan bahan logistik kantor, 5) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 100%, melalui sub kegiatan : 1) pengadaan mebel dan 2) pengadaan aset tetap lainnya.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya penyediaan jasa penunjang di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor, melalui sub kegiatan 1) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, 2) penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebanyak 100%, melalui sub kegiatan 1) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, 2) pemeliharaan aset tetap lainnya, 3) pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

7. Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat di Puskesmas se-Kota Bogor dan Labkesda.

Tabel 2.5 Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	82,2 Nilai	78.49	95.5%	Perubahan nomenklatur sesuai Kemeterian Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 dan Permendagri 90 Tahun 2018
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	82,2 Nilai	78.49	95.5%	Perubahan nomenklatur sesuai Kemeterian Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 dan Permendagri 90

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
					Tahun 2019
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan (Renstra, Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan)	6 Dokumen	6	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Monev Renja, LKPJ, LPPD, LKIP)	4 Dokumen	4	100%	
	Dokumen Laporan Capaian SPM dan IKM	2 Dokumen	2	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan BPK dan inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	680 orang	655	96.3%	Terdapat ASN yang sudah pensiun maupun mutasi ke instansi lain.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hibah Bidang Kesehatan	4 Lembaga	4	100%	
	Laporan Kegiatan	16 Buku	16	100%	
	Pelatihan PPK BLUD	1 Kegiatan	1	100%	
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Covid 19	275000 Lembar	275000 Lembar	100%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK	1 Paket	1	100%	
	Tersedianya ATK di Pusat Isolasi	1 Paket	1	100%	
	Tersedianya ATK Kegiatan Vaksinasi	1 Paket	1	100%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tersedianya peralatan rumah tangga	100%	100	100%	
	Tersedianya BHP Kebersihan di Pusat isolasi	1 Paket	1	100%	
	Tersedianya Perlengkapan Pasien di Pusat Isolasi	1 Paket	1	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya makanan dan minuman	1 Paket	1	100%	
	Tersedianya makan dan minuman kegiatan vaksinasi Covid-19	1 Paket	1	100%	
	Tersedianya makan dan minuman pusat isolasi	1 Paket	1	100%	
	Tersedianya refil air minum di pusat isolasi	1 Paket	1	100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	100%	
	Tersedianya Honor Narasumber Non ASN Untuk Pelatihan dan Monev di Pusat Isolasi	8 OJ	0	0%	Anggaran honor tidak diserap, solusi yang disarankan yaitu melakukan pelatihan dengan narasumber dari Dinkes Kota Bogor yang sebelumnya telah ikut dalam pelatihan SDM di pusat isolasi lido
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
	Tersedianya Laptop Untuk Penunjang Pelaporan Covid-19 Pusat Isolasi	1 Unit	1	100%	
	Tersedianya laptop untuk vaksinasi covid-19	17 Unit	17	100%	
	Tersedianya Printer Untuk Penunjang Pelaporan Covid-19 Pusat Isolasi	1 Unit	1	100%	
	Tersedianya printer untuk vaksinasi covid-19	32 Unit	32	100%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan kebersihan kantor	100%	100%	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penambahan daya listrik mobile BSL 2	39000 Kwh	39000	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	1 Paket	100%	
	Penyediaan pemeliharaan mobile BSL 2	1 Paket	1 Paket	100%	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor	100%	100%	100%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor	100%	99.71%	100%	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	71.95%	71.95%	Beberapa kegiatan pengadaan terkendala dengan kegiatan vaksinasi
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bogor Selatan	100%	54.77%	54.77%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cipaku	100%	86.49%	86.49%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bondongan	100%	48.39%	48.39%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lawang Gintung	100%	57.77%	57.77%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bogor Timur	100%	74.90%	74.90%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pulo Armin	100%	82.85%	82.85%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bogor Tengah	100%	78.76%	78.76%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sempur	100%	66.66%	66.66%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gang Aut	100%	68.91%	68.91%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Belong	100%	74.26%	74.26%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Merdeka	100%	75.38%	75.38%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Semplak	100%	70.61%	70.61%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pancasan	100%	84.21%	84.21%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pasir Mulya	100%	74.55%	74.55%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gang Kelor	100%	62.83%	62.83%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sindang Barang	100%	66.86%	66.86%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bogor Utara	100%	85.77%	85.77%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PKM Tegal Gundil	100%	69.29%	69.29%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Warung Jambu	100%	70.94%	70.94%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tanah Sareal	100%	81.66%	81.66%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pondok Rumpit	100%	78.75%	78.75%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedung Badak	100%	77.33%	77.33%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kayumanis	100%	70.00%	70.00%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mekarwangi	100%	87.79%	87.79%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mulyaharja	100%	63.85%	63.85%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Labkesda	100%	99.43%	99.43%	

Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Bogor

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	65	74,50	70,0	102,3	53,8%	65		
		Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3,0	3,15	3,1	3,47	88,1%	3,0		
		Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3,2	3,36	3,3	3,58	91,5%	3,2		
		Persentase Balita berstatus gizi normal	86,3	85,10	86,00	83,3	96,9%	86,3		
		Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90	90	90	72	80,0%	90		
		Prevalensi Hipertensi	7,2	6,4	6,5	6,62	101,8%	7,2		
		Case Fatality Rate Covid-19	1,2	2,4	1,3	1,2	107,7%	1,2		
		Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0,12%	0,11%	0,12%	0,11%	92,4%	0,12%		
		Akses sanitasi terhadap air bersih	99,4%	99%	99,2%	99%	99,7%	99,4%		
		Akses jamban sehat	82%	79%	80%	76,34%	95,4%	82%		
		Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	93	91,1	92,0	90,46	98,3%	93		
1.02.02.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	0,70	0,66	0,67	0,67	100,0%	0,70		
		Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	84,75	65	84,75	60	70,8%	84,75		
		Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19	1	NA	1	2	200,0%	1		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.201.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3	NA	3	3	100%	3		
1.02.02.201.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	160	NA	NA	NA	NA	160		
1.02.02.201.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	NA	NA	NA	NA	100		
1.02.02.201.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1		
1.02.02.201.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1		
1.02.02.201.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0	NA	NA	NA	NA	0		
1.02.02.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100		
		Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	3500	1842	3400	3054	90%	3500		
		Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	96	24	31%	91,53	295,26	96		
		Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	93	91,1	92	90,46	98%	93		
		Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	49	47	57	47	82%	49		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	100	100	100	96,7	96,7%	100		
		Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	100	100	100	94,9	94,9%	100		
		Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	100	100	100	99,7	99,7%	100		
		Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	100	100	100	94,1	94,1%	100		
		Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	10,10	4,75	4,7	5,33	86,6%	10,10		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	46,6	46,6%	100		
		Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	62,36	62,4%	100		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100,0%	100		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	101,85	101,9%	100		
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	104,45	104,5%	100		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	76,34	76,3%	100		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	50,6	50,6%	100		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	92,7	92,7%	100		
		Prevalensi Covid-19	≤ 3,5 %	NA	≤ 3,7 %	3,39	91,6%	≤ 3,5 %		
		Persentase imunisasi Covid-19	70	NA	40%	102%	255%	70		
		Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF	1	NA	0	0	0	1		
1.02.02.202.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19309	19566	19238	18604	96,7%	19309		
1.02.02.202.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18432	18583	18363	17426	94,9%	18432		
1.02.02.202.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17630	18677	17476	17428	99,7%	17630		
1.02.02.202.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84824	59080	84729	79694	94,1%	84824		
1.02.02.202.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152023	40924	76642	35694	46,6%	152023		
1.02.02.202.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755429	140613	755429	471086	62,4%	755429		
1.02.02.202.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103954	76666	66840	66840	100,0%	103954		
1.02.02.202.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61350	53635	55385	56411	101,9%	61350		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.202.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17042	17431	17042	17801	104,5%	17042		
1.02.02.202.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1352	1376	1551	1184	76,3%	1352		
1.02.02.202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19936	3352	18909	9568	50,6%	19936		
1.02.02.202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24267	13306	13053	12108	92,8%	24267		
1.02.02.202.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.02.202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.02.202.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.02.202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.02.202.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	NA	NA	NA	NA	2		
1.02.02.202.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	NA	NA	NA	NA	1		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.202.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.02.202.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	23748	NA	NA	NA	NA	23748		
1.02.02.202.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20	NA	NA	NA	NA	20		
1.02.02.202.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	9	NA	NA	NA	NA	9		
1.02.02.202.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15	NA	NA	NA	NA	15		
1.02.02.202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.02.202.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.02.202.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	49	NA	NA	NA	NA	49		
1.02.02.202.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.02.202.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.02.203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health	75%	NA	75%	95,6	127,47	75%		
1.02.02.203.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	NA	NA	NA	NA	1		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.203.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.02.203.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	2	NA	NA	NA	NA	2		
1.02.02.204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	84%	80%	82%	81,24%	99,07%	84%		
1.02.02.204.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60	NA	NA	NA	NA	60		
1.02.02.204.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6	NA	NA	NA	NA	6		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	90	87	86	89,7	104,3%	90		
		Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	88	90	84	-	0%	88		
		Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	81	NA	73	97,4	133,4%	81		
1.02.03.201	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	90	87	86	89,7	104,3%	90		
1.02.03.201.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	150	NA	NA	NA	NA	150		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.03.202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Dibutuhkan Sesuai dengan Dokumen	81	58%	73%	28%	38%	81		
1.02.03.202.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26	NA	NA	NA	NA	26		
1.02.03.202.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	79	NA	NA	NA	NA	79		
1.02.03.202.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	140	NA	NA	NA	NA	140		
1.02.03.203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi	262	238	249	242	97,2%	262		
1.02.03.203.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	87	NA	NA	NA	NA	87		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	85%	NA	82%	50%	61,0%	85%		
		Persentase Penggunaan Obat Rasional	79%	75%	77%	80%	103,9%	79%		
		Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	92%	NA	90%	64%	71,1%	92%		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.04.203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat	92,00	90	91	64	70,3%	92,00		
1.02.04.203.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	175	NA	NA	NA	NA	175		
1.02.04.204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene	61	59	60%	74,7%	124,5%	61		
1.02.04.204.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.04.205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan	54	50	52	0	0	54		
1.02.04.205.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	NA	NA	NA	NA	1		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.04.206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	10	NA	10	10	100%	10		
1.02.04.206.01	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40	NA	NA	NA	NA	40		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	8	4	7	7,35	105%	8		
		Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wiwerda	Tahun 2020 tidak ada penilaian	Swastisaba Wiwerda	Tahun 2021 tidak ada penilaian	Tahun 2021 tidak ada penilaian	Swastisaba Wiwerda		
1.02.05.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	30	10	20%	0,96%	5%	30		
1.02.05.201.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	14	NA	NA	NA	NA	14		
1.02.05.202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber PHBS \geq target PHBS tingkat kota	55	NA	50%	72,1	144,2	55		
1.02.05.202.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	NA	NA	NA	NA	4		
1.02.05.203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	5.8	NA	5,7	41,8	733%	5.8		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.05.203.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	NA	NA	NA	NA	5		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	3,4	3,34	3,35	3,23	96,4%	3,4		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	A	BB	BB	100%	A		
1.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	A	BB	BB	100%	A		
1.02.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	100%	6		
1.02.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	100%	4		
1.02.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.02.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750	687	680	655	96,3%	750		
1.02.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	NA	NA	NA	NA	16		
1.02.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	100	100		
1.02.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	NA	NA	NA	NA	1		

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	NA	NA	NA	NA	2		
1.02.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	NA	NA	NA	NA	3		
1.02.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	NA	NA	NA	NA	1		
1.02.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	101	100	100	100	100%		
1.02.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	NA	NA	NA	NA	4		
1.02.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	NA	NA	NA	NA	5		
1.02.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	100	NA	100	100	100	100		
1.02.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	NA	NA	NA	NA	20		
1.02.01.209.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	670	NA	NA	NA	NA	670		
1.02.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	NA	NA	NA	NA	3		
1.02.01.210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100	NA	100%	71,95	71,95	100		
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	26	NA	26	26	100%	26		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bogor disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD pada Peraturan Daerah No. 92 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota No 475 Tahun 2008, dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri atas sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Fokus pelayanan yang diberikan bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi.

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

- a. APBD Kota Bogor sebesar Rp.1.114.080.200,- (satu milyar seratus empat belas juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah)
- b. APBN sebesar Rp. 905.768.375,- (sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian : APBN DAK Fisik sebesar Rp. 738.389.575,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan APBN DAK Non Fisik

(BOK) sebesar Rp. 167.378.800 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Sehingga total keseluruhan Rp. 2.019.848.575,- (dua milyar sembilan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian :

Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- APBD Kota Bogor	199.887.800
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		142.921.400
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		124.937.800
4	Pelayanan Kesehatan Balita		59.625.400
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- APBD Kota Bogor - BOK	153.926.400
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- APBD Kota Bogor - BOK	193.847.200
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- APBD Kota Bogor - BOK	101.733.200
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- APBD Kota Bogor - BOK	40.912.200
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)		19.567.200
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		30.143.400
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	- APBD Kota Bogor - Dak Fisik	31.064.000 738.389.575
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- APBD Kota Bogor	182.893.000

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Tahun 2021

Berikut permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 yang tidak memenuhi target 100%, yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.7%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena kondisi pandemi dimana pelayanan posyandu ditutup, sehingga ibu hamil harus ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan yang jaraknya cukup jauh dari rumah. 2. Angka Kematian Ibu 102.37 per 100.000 KH, terjadi lonjakan karena adanya ibu hamil terkonfirmasi Covid-19 dan meninggal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pembukaan posyandu sesuai protokol kesehatan dan melakukan pencatatan dan pelaporan dengan baik 2. Mengaktifkan WAG untuk memantau kondisi ibu hamil 3. Dilakukan skrining PCR untuk ibu hamil di usia kehamilan 35-36 minggu dan pada bumil yang kontak erat dan suspek
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	94.9%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena Saat pandemi covid-19 kapasitas layanan persalinan di fasilitas kesehatan berkurang akibat banyaknya nakes yang terkonfirmasi Covid-19 2. Belum semua puskesmas mampu melakukan upaya pertolongan persalinan karena kendala ruangan yang tidak ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan update data ibu bersalin 2. Merevisi target karena kota Bogor memiliki 25 puskesmas dengan puskesmas yang mampu melakukan pelayanan persalinan sebanyak 17 puskesmas
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99.7%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena kondisi pandemi dimana pelayanan Posyandu tutup sehingga bayi baru lahir harus ke puskesmas untuk pemeriksaan bayi yang jaraknya cukup jauh dari rumah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pembukaan kembali posyandu dan mengaktifkan WAG untuk memantau kondisi bayi baru lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita	94.1%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pandemi dimana pelayanan posyandu tutup sehingga ibu balita harus ke puskesmas untuk periksa kesehatan balita yang jaraknya cukup jauh dari rumah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pembukaan kembali posyandu, kelas balita dan mengaktifkan WAG untuk memantau kondisi balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.6%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga petugas kesehatan kesulitan untuk melakukan skrining secara langsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaringan kesehatan anak sekolah dilakukan secara online dengan mengisi <i>google form</i> oleh masing-masing orang tua siswa 2. Pengisian <i>google form</i> dibuat lebih sederhana sehingga mudah diisi oleh orangtua/siswa

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	62.36%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pandemik yang menyebabkan Posbindu PTM tidak dapat dilaksanakan. 2. Tidak tersedianya reagen pemeriksaan kadar gula darah pada tahun 2021, sehingga pemeriksaan skrining tidak dapat dilakukan sesuai standar. 3. Usia produktif berada di tempat kerja dan sekolah, sedangkan pada masa Pandemi masyarakat pekerja melakukan WFH dan pelajar melakukan pembelajaran jarak jauh, sehingga sulit untuk dijangkau. 4. Kegiatan di Posbindu PTM baru dapat berjalan pada bulan Oktober-Desember. 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatan dirinya secara rutin, dan pengisian status kesehatan secara mandiri melalui on line. 2. Memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan, Kader PTM terlatih, dan sarana prasarana seperti penyediaan sistem informasi perangkat keras untuk pencatatan pelaporan dengan berbasis NIK, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi double counting dalam pencatatannya, juga diharapkan keterpaduan sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan baik dari sarana pemerintah maupun dari sarana kesehatan swasta (sistem data satu pintu) 3. Skrining usia produktif dilakukan dengan pendekatan Posbindu PTM di masyarakat maupun di tempat tempat kerja dan sekolah, dengan melatih kader kesehatan di Posbindu PTM.
7	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	76.34%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena kondisi Pandemi Covid 19 membuat kegiatan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan ditiadakan sementara, kecuali untuk kondisi darurat. 2. Pelayanan Pasien ODGJ di masa pandemi hanya dilakukan di puskesmas. 3. Jumlah kunjungan untuk kontrol/terapi obat bagi pasien ODGJ di masa pandemi Covid-19 untuk beberapa pasien menjadi kurang teratur menyebabkan kondisi kekambuhan kembali pada ODGJ atau putus obat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan SDM dalam kemampuan pelayanan ODGJ sesuai standar, menyediakan media KIE 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, lintas program dan lintas sektor dalam melaksanakan kesehatan jiwa, dan melakukan pendampingan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) baik untuk orang sehat, orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) dan orang dengan gangguan kesehatan jiwa (ODGJ)
8	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	50.6%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena masih pasifnya skrining terduga TBC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigasi kontak ke indeks kasus
9	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	92.7%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19, banyak SDM layanan HIV yang sudah dilatih di mutasi atau promosi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilmu yang didapatkan dari SDM layanan yang telah dimutasi atau rotasi disosialisasikan kepada SDM yang baru.

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Bogor

No	Indikator	SPM	IKK	Target	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		√	70	96,7		60	55	
2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		√	3,1	3,47		2,9	2,8	
3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup		√	3,3	3,58		3,1	3	
4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk		√	0,02	0,20		0,02	0,02	
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		√	0,84	1.35		0,92	0,96	
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		√	98	94,9		100	100	
7	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)		√	86	89,7		95	100	
8	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk		√	0,67	0,67		0,7	0,72	
9	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		√	90	72,1		95	100	
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		√	100	100		100	100	
11	Persentase anak usia 1 Tahun yang diimunisasi campak		√	97,5	91,5		98,5	99	
12	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		√	7 Kasus Negatif	1 kasus		7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	
13	Cakupan pneumonia balita yang ditangani		√	60	100		80	100	
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		√	70	100		90	100	
15	Prevalensi Hipertensi		√	6,5	6,62		7,9	8,4	
16	Prevalensi Diabetes Militus		√	2	1,58		2	2	
17	Persentase kesembuhan TB Paru		√	81,22	44,24		86,5	87,5	
18	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)		√	62,5	50		61,5	60	
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		√	100	100		100	100	
20	Angka bebas jentik nyamuk DBD		√	95,4	92		95,7	96	
21	Persentase penemuan penderita diare pada balita		√	100	17,7		100	100	
22	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		√	100	100		100	100	
23	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi		√	<0,5	<0,5		<0,5	<0,5	
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		√	100	96,11		100	100	
25	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)		√	85	85		95	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
26	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)		√	31	91,53		44	51	
27	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)		√	92	90,46		94	95	
28	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi		√	100	8		100	100	
29	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani		√	76	80,59		78	80	
30	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		√	100	100		100	100	
31	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		√	100	93,8		100	100	
32	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		√	100	100		100	100	
33	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		√	100	100		100	100	
34	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		√	100	100		100	100	
35	Angka Harapan Hidup (AHH)		√	73,96	73,82		74,04	74,18	
36	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs		√	4,7	5,33		10	9,9	
37	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)		√	4,42	4,77		3,98	3,98	
38	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar	√	√	100	96,7		100	100	
39	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	√	√	100	94,9		100	100	
40	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	√	√	100	99,7		100	100	
41	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	√	√	100	94,1		100	100	
42	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100	46,6		100	100	
43	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100	62,36		100	100	

No	Indikator	SPM	IKK	Target	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
44	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100	100		100	100	
45	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100	101,85		100	100	
46	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100	104,45		100	100	
47	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	√		100	76,34		100	100	
48	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	√		100	50,6		100	100	
49	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	√		100	92,7		100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa datang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 92 Tahun 2018 Dinas Kesehatan mempunyai Tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : (a). Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan Sumber daya kesehatan; (b). Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; (c). Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan; (d). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (e). Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; (f). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bogor, masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

1. Masih adanya kematian pada ibu, bayi, dan balita.

Pada tahun 2021 rasio kematian ibu 96.7 per 100.000 kelahiran hidup belum mencapai target yaitu masih diatas 69 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 rasio kematian bayi 3.47 per 1.000 kelahiran hidup belum mencapai target yaitu masih diatas 2.94 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun rasio kematian balita pada tahun 2021 mencapai 3.58 per 1.000 kelahiran hidup juga belum mencapai target 2.87 per 1.000 kelahiran hidup. Oleh sebab itu, kematian ibu, bayi, dan balita masih menjadi tantangan dan fokus penyelesaian permasalahan kesehatan.

2. Masih rendahnya status gizi masyarakat

Salah satu gambaran status gizi yaitu ditunjukkan pada gizi buruk dan gizi kurang (*underweight*). Pada Tahun 2021 terdapat peningkatan sebanyak 550 kasus dari tahun 2020 yaitu sebanyak 2915 kasus menjadi 3465 kasus. Salah satu penyebab rendahnya status gizi masyarakat yaitu adanya pandemi Covid-19 dari tahun 2020.

3. Rendahnya perilaku hidup bersih sehat
Pada Tahun 2021 persentase rumah tangga berPHBS sudah mencapai target dan terdapat peningkatan sebesar 3,0% dari 66,3% menjadi 69,3%. Beberapa masalah Perilaku Hidup Bersih Sehat yang perlu ditingkatkan berdasarkan survey PHBS oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2021 yaitu pemberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan) (70.4%), tidak merokok di dalam rumah (70.1%), dan penggunaan jamban sehat (85.1%).
4. Kecenderungan meningkatnya penyakit menular berbasis lingkungan masyarakat.
Jumlah kasus TB Paru BTA+ di Kota Bogor dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 telah mengalami peningkatan sebesar 1964 kasus. Pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 2583 kasus dan di tahun 2021 terdapat 4547 kasus. Penderita Demam Berdarah Dengue di Kota Bogor tahun 2021 ditemukan sebanyak 526 orang, kejadian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 234 orang. Adapun, jumlah kematian yang disebabkan oleh DBD sebanyak 7 kasus dan angka ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 6 orang. Sedangkan, untuk jumlah kasus HIV positif berdasarkan faktor resiko terjadi penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 39 kasus.
5. Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular
Salah satu indikator penyakit tidak menular yaitu hipertensi dan diabetes militus (DM). Jumlah kasus hipertensi di Kota Bogor dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 telah mengalami peningkatan sebesar 3731 kasus. Pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 52680 kasus dan di tahun 2021 terdapat 56411 kasus.
Pada tahun 2021 jumlah kasus diabetes militus (DM) di Kota Bogor sebanyak 17801 kasus. Terdapat peningkatan dari Tahun 2020 sebanyak 370 kasus.
6. Lingkungan yang belum sehat
Beberapa faktor lingkungan yang masih menjadi masalah prioritas yaitu kondisi rumah yang belum sehat. Pada tahun 2021 akses jamban sehat baru mencapai 76%.
7. Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan.
Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk puskesmas induk masih kurang dengan rasio 1: 45077, idealnya 1 per 30.000 penduduk. Masih kurangnya puskesmas di Kota Bogor menjadi bagian sarana yang perlu dibangun atau direhabilitasi dalam pemerataan pelayanan kesehatan dasar di 68 Kelurahan di Kota Bogor. Sedangkan untuk rumah sakit sudah mencukupi. Namun demikian ketersediaan tempat tidur masih menjadi kendala dikarenakan pasien yang berkunjung/rawat jalan dan dirawat inap tidak hanya berasal dari Kota Bogor

melainkan dari Kabupaten Bogor, Kota Depok, dll. Hal ini ditunjukkan dengan angka BOR (*Bed Occupancy Rate*) yang belum ideal yaitu 41%, idealnya 60%-85% (Kemenkes RI). Permasalahan lain yaitu sistem rujukan baik secara berjenjang dan kegawatdaruratan belum berjalan optimal dikarenakan komitmen, kepatuhan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung belum optimal.

8. Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan.

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional pada tahun 2021 yaitu 90.46%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat penurunan sebesar 0.64%. Pencapaian ini belum mencapai *Universal Health Coverage* (Cakupan UHC minimal 95%) dan belum mencapai target Renstra tahun 2021 yaitu 97%.

Selain itu, pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin melalui program JKN masih belum dapat terealisasi dengan optimal. Masih ada masyarakat yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan dan Penduduk Miskin Kota Bogor yang menggunakan jaminan Kesehatan untuk berobat jalan masih sangat rendah.

9. Belum semua fasilitas kesehatan sesuai dengan standar.

Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kota Bogor sebanyak 47 dari 57 faskes yang menjadi target tahun 2021. Sedangkan jumlah klinik pratama yang terakreditasi sebanyak 4 klinik pratama dari 12 faskes yang menjadi target tahun 2021.

10. Kebutuhan sumber daya manusia belum semua sesuai kebutuhan

Pada tahun 2020 existing tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Bogor adalah sebanyak 718 orang. Existing 718 tersebut terdiri dari tenaga PNS, PKWT, PTT Provinsi, Internship, dan tenaga BLUD. Total beban kerja untuk semua jabatan fungsional tersebut adalah 860, sehingga masih dibutuhkan sebanyak 142 lagi untuk mengisi kekurangan tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi sembilan jenis ketenagaan minimal sesuai Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat melalui pengadaan CASN, dan perekrutan tenaga non PNS baik itu dari anggaran pemerintah daerah (PKWT) maupun dari anggaran pemerintah pusat (DAK non Fisik/BOK).

11. Pengelolaan data informasi kesehatan masih belum optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan. Pengelolaan data dan informasi belum terintegrasi atau satu pintu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rujukan, dan Dinas Kesehatan.

12. Akuntabilitas Kinerja dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pemanfaatan perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja belum dioptimalkan dalam penyusunan program/kegiatan secara terpadu dalam pencapaian kinerja.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Bogor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Bogor	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	60	95.046.796.511	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Bogor	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	60	127.612.819.990	
		Kota Bogor	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	2,9			Kota Bogor	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	2,9		
		Kota Bogor	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3,1			Kota Bogor	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3,1		
		Kota Bogor	Persentase Balita berstatus gizi normal	86,6			Kota Bogor	Persentase Balita berstatus gizi normal	86,6		
		Kota Bogor	Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90			Kota Bogor	Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90		
		Kota Bogor	Prevalensi Hipertensi	7,9			Kota Bogor	Prevalensi Hipertensi	7,9		
		Kota Bogor	Case Fatality Rate Covid-19	1,1			Kota Bogor	Case Fatality Rate Covid-19	1,1		
		Kota Bogor	Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0,13%			Kota Bogor	Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0,13%		
		Kota Bogor	Akses sanitasi terhadap air bersih	99,6%			Kota Bogor	Akses sanitasi terhadap air bersih	99,6%		
		Kota Bogor	Akses jamban sehat	84%			Kota Bogor	Akses jamban sehat	84%		
		Kota Bogor	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	94			Kota Bogor	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	94		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Bogor	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	0,70	24.755.071.053	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kota Bogor	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	0,70	37.224.089.170	
		Kota Bogor	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	85			Kota Bogor	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	85		
		Kota Bogor	Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19	1			Kota Bogor	Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19	1		
	Pembangunan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3	17.000.000.000	Pembangunan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3	17.035.040.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	15	3.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Bogor	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	15	3.200.000.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	75.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	170	7.336.881.820	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Bogor	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1	100.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Kota Bogor	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	1.500.000.000	Pengadaan Obat, Vaksin	Kota Bogor	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	42	1.500.000.000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kota Bogor	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	3.080.071.053	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kota Bogor	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	28	8.152.167.350	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	67.886.807.458	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	88.180.690.720	
		Kota Bogor	Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	3600			Kota Bogor	Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	3600		
		Kota Bogor	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	97			Kota Bogor	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	97		
		Kota Bogor	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	94			Kota Bogor	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	94		
		Kota Bogor	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	55			Kota Bogor	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	55		
		Kota Bogor	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	100			Kota Bogor	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kota Bogor	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	100			Kota Bogor	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	100		
		Kota Bogor	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	100			Kota Bogor	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	100		
		Kota Bogor	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	100			Kota Bogor	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	100		
		Kota Bogor	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	10,00			Kota Bogor	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	10,00		
		Kota Bogor	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Kota Bogor	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		Kota Bogor	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			Kota Bogor	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		
		Kota Bogor	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100			Kota Bogor	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kota Bogor	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Kota Bogor	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		Kota Bogor	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			Kota Bogor	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		
		Kota Bogor	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100			Kota Bogor	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100		
		Kota Bogor	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100			Kota Bogor	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100		
		Kota Bogor	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100			Kota Bogor	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100		
		Kota Bogor	Prevalensi Covid-19	≤ 3,2 %			Kota Bogor	Prevalensi Covid-19	≤ 3,2 %		
		Kota Bogor	Persentase imunisasi Covid-19	70			Kota Bogor	Persentase imunisasi Covid-19	70		
		Kota Bogor	Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF	2			Kota Bogor	Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF	2		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19309	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bogor	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19309	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Bogor	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18432	199.999.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Bogor	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18432	350.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Bogor	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17630	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Bogor	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17630	30.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Bogor	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84824	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Bogor	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84824	50.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152023	200.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bogor	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152023	20.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755429	763.879.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755429	106.986.800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103954	199.999.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Bogor	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103954	43.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Bogor	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67315	196.780.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Bogor	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67315	147.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Bogor	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17402	54.355.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Bogor	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17402	7.473.178.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1465	40.814.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1465	28.365.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19912	355.030.599	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19912	41.800.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24267	477.480.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Bogor	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24267	105.470.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	190.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	120.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1.300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1.299.320.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	70.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	70.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	267.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	264.562.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8	199.450.158	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8	13.065.770.920	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	150.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	5.000.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	174.550.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	150.100.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	31664	11.600.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Bogor	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	31664	9.310.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Bogor	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25	32.571.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Bogor	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25	10.000.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	9	250.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	9	35.389.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15	59.857.023.500	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15	56.730.043.400	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	228.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	180.000.000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	55	750.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	55	493.515.000	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	652.442.701	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	7.051.379.900	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Bogor	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	665.830.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Bogor	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	250.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Bogor	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health	85%	2.280.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Bogor	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health	85%	2.155.395.100	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	150.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	150.000.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	500.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	832.050.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kota Bogor	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	2	1.630.000.000	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kota Bogor	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	3	1.173.345.100	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Kota Bogor	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	86%	124.918.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Kota Bogor	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	86%	52.645.000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60	114.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	60	41.645.000	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6	10.918.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6	11.000.000	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Bogor	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	95	6.771.238.180	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Bogor	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	95	6.323.600.000	
		Kota Bogor	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	92			Kota Bogor	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	92		
		Kota Bogor	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	90			Kota Bogor	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	90		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	95	3.600.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	95	3.600.000	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	1.800.000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	1.800.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	150	1.800.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	150	1.800.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah SDM yang Dibutuhkan Sesuai dengan Dokumen	90	6.099.599.380	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah SDM yang Dibutuhkan Sesuai dengan Dokumen	90	6.020.000.000	
		Kota Bogor	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,92			Kota Bogor	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,92		
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26	30.799.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26	5.000.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	225	6.021.576.280	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	225	6.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	280	47.224.100	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	280	15.000.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi	275	668.038.800	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi	275	300.000.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	87	668.038.800	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	87	300.000.000	
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Bogor	Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	86%	553.739.900	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Bogor	Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	86%	698.835.700	
		Kota Bogor	Persentase Penggunaan Obat Rasional	82%			Kota Bogor	Persentase Penggunaan Obat Rasional	82%		
		Kota Bogor	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	94%			Kota Bogor	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	94%		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	Terpenuhinya standar persyaratan perizinan apotek, toko obat dan UMOT	75	187.593.600	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	Terpenuhinya standar persyaratan perizinan apotek, toko obat dan UMOT	75	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60	89.096.800						
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	60	98.496.800	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bogor	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	60	30.000.000	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Usaha produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang bersertifikat	16	29.993.500	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Usaha produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang bersertifikat	16	468.835.700	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2	29.993.500	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	2	23.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	445.835.700	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat	93,00	58.175.600	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat	93,00	30.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Di produksi oleh Industri Rumah Tangga	175	58.175.600	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Di produksi oleh Industri Rumah Tangga	175	30.000.000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bogor	Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene	62	94.000.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bogor	Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene	62	90.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	94.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	90.000.000	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan	56	170.000.000	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan	56	70.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	170.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	70.000.000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	10	13.977.200	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	10	10.000.000	
	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta	Kota Bogor	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan	130	13.977.200	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Bogor	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan	40	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tindak Lanjut Pengawasan		Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan					Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Bogor	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	9	8.859.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Bogor	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	9	12.328.780.000	
		Kota Bogor	Predikat Kota Sehat	Swastisa ba Wiwerda				Kota Bogor	Predikat Kota Sehat		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bogor	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	40	450.000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bogor	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	40	168.110.000	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56	450.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56	168.110.000	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber PHBS \geq target PHBS tingkat kota	60	9.000.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber PHBS \geq target PHBS tingkat kota	60	168.110.000	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	9.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	168.110.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	5.9	8.400.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	5.9	11.992.560.000	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	8.400.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	11.992.560.000	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bogor	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	3,4	105.638.866.331	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bogor	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	3,4	100.379.729.338	
		Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A			Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	314.990.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	320.390.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	207.190.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	212.590.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	107.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	107.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	91.847.876.331	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	88.305.135.347	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	923	89.642.126.331	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	923	86.927.929.347	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	2.205.750.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16	1.377.206.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	7.449.063.765	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	5.876.679.835	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	217.294.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	225.503.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	334.593.265	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	480.772.107	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	636.756.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	305.477.628	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	3.692.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4.095.152.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	2.567.920.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	769.775.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	1.435.974.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	609.622.149	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Mebel	Kota Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	132	350.290.600	Pengadaan Mebel	Kota Bogor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	132	69.386.900	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	103	1.085.684.300	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	103	540.235.249	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.131.864.136	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.394.412.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	851.550.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	1.083.222.648	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1.280.314.136	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1.311.190.152	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	2.459.097.199	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	2.873.489.207	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	820.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	551.600.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1.042	498.897.199	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1.042	715.700.900	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1.140.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1.606.188.307	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PUSKESMAS BOGOR SELATAN				3.911.942.100	PUSKESMAS BOGOR SELATAN				3.911.942.100	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
2	PUSKESMAS CIPAKU				3.377.856.570	PUSKESMAS CIPAKU				3.377.856.570	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
3	PUSKESMAS BONDONGAN				2.927.647.030	PUSKESMAS BONDONGAN				2.927.647.030	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
4	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG				1.778.114.360	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG				1.778.114.360	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
5	PUSKESMAS BOGOR TIMUR				4.442.747.320	PUSKESMAS BOGOR TIMUR				4.442.747.320	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
6	PUSKESMAS PULO ARMYN				2.371.336.220	PUSKESMAS PULO ARMYN				2.371.336.220	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
7	PUSKESMAS BOGOR TENGAH				2.076.837.950	PUSKESMAS BOGOR TENGAH				2.076.837.950	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
8	PUSKESMAS SEMPUR				1.727.993.740	PUSKESMAS SEMPUR				1.727.993.740	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
9	PUSKESMAS GANG AUT				1.158.835.150	PUSKESMAS GANG AUT				1.158.835.150	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
10	PUSKESMAS BELONG				696.070.650	PUSKESMAS BELONG				696.070.650	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
11	PUSKESMAS MERDEKA				2.142.434.470	PUSKESMAS MERDEKA				2.142.434.470	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
12	PUSKESMAS SEMPLAK				3.173.676.330	PUSKESMAS SEMPLAK				3.173.676.330	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
13	PUSKESMAS PANCASAN				2.320.587.610	PUSKESMAS PANCASAN				2.320.587.610	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
14	PUSKESMAS PASIR MULYA				3.153.148.680	PUSKESMAS PASIR MULYA				3.153.148.680	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
15	PUSKESMAS GANG KELOR				2.681.203.910	PUSKESMAS GANG KELOR				2.681.203.910	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
16	PUSKESMAS SINDANG BARANG				4.157.694.310	PUSKESMAS SINDANG BARANG				4.157.694.310	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
17	PUSKESMAS BOGOR UTARA				4.245.476.180	PUSKESMAS BOGOR UTARA				4.245.476.180	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
18	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL				2.436.049.440	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL				2.436.049.440	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
19	PUSKESMAS WARUNG JAMBU				3.072.660.690	PUSKESMAS WARUNG JAMBU				3.072.660.690	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
20	PUSKESMAS TANAH SAREAL				2.954.008.090	PUSKESMAS TANAH SAREAL				2.954.008.090	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
21	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT				1.005.242.590	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT				1.005.242.590	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
22	PUSKESMAS KEDUNG BADAQ				2.771.313.820	PUSKESMAS KEDUNG BADAQ				2.771.313.820	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
23	PUSKESMAS KAYU MANIS				2.705.989.550	PUSKESMAS KAYU MANIS				2.705.989.550	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
24	PUSKESMAS MEKARWANGI				2.864.136.550	PUSKESMAS MEKARWANGI				2.864.136.550	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		
25	PUSKESMAS MULYAHARJA				2.042.443.700	PUSKESMAS MULYAHARJA				2.042.443.700	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
26	LABKESDA				973.635.012	LABKESDA				973.635.012	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Tabel 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kota Bogor**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Bogor

Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Pagu	Pokir / Musrenbang	Ket.
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kel. Bubulak Bubulak Bogor Barat	1	Paket	20.000.000	Musrenbang	DED
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kel. Cilendek Timur Cilendek Timur Bogor Barat	12	Set	120.000.000	Musrenbang	12 Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KEAN SITUGEDE Situgede Bogor Barat	1	Set	30.000.000	Musrenbang	3 Posyandu Kit
	KEAN SITUGEDE Situgede Bogor Barat	12	Kegiatan	-	Musrenbang	
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kean cilendek barat Cilendek Barat Bogor Barat	2	Set	30.000.000	Musrenbang	3 Posyandu Kit
	kean cilendek barat Cilendek Barat Bogor Barat			-	Musrenbang	Pemberian Makanan Tambahan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Curug Mekar RW 01-10 Curug Mekar Bogor Barat	10	Set	100.000.000	Musrenbang	
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RW.04 Gunung Batu Bogor Barat	3	Set	30.000.000	Musrenbang	
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pasirjaya Pasir Jaya Bogor Barat	5	Buah	10.000.000	Musrenbang	5 Kursi Roda
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kean Gudang Gudang Bogor Tengah	12	Set	15.600.000	Musrenbang	
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KEAN BABAKAN PASAR Babakan Pasar Bogor Tengah	5	Set	50.000.000	Musrenbang	5 Posyandu Kit
	RW.1-14 Baranangsiang Bogor Timur	50	Orang	-	Musrenbang	
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Posyandu Se-Kean, Kota Bogor Kedung Halang Bogor Utara	17	Set	170.000.000	Musrenbang	17 Posyandu Kit
Pengadaan	JL. RM TIRTO	1	paket	20.000.000	Musrenbang	DED

Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Pagu	Pokir / Musrenbang	Ket.
Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ADHI SURDJO NO. 3 (ex Jln Kesehatan no 3) RT 02 RW 02 Tanah Sareal Bogor Utara					Puskesmas Tanah Sareal
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kean Kedung Badak RW 01 S/d 14 , Kota Bogor Kedung Badak Bogor Utara	24	Set	240.000.000	Musrenbang	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RW. 01 - RW. 15 Cibadak Bogor Utara	19	Set	190.000.000	Musrenbang	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Se-Kean Kencana, Kota Bogor Kencana Bogor Utara	18	Set	180.000.000	Musrenbang	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RW.001 - RW.008, Kel. Sukaesmi Kota Bogor Sukaesmi Bogor Utara	10	Set	100.000.000	Musrenbang	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Gg. Menteng RT 2 RW 13 Kelurahan Menteng	12	Set	12.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jl. Cijahe RT 2 RW 2 Kelurahan Curug Mekar	12	Set	12.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jl. Sukamulya RT RW 2 Kelurahan SUKASARI	6	Set	6.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jalan R.M. Tirta Adhi Soerjo, RT.02/RW.02, Kota Bogor RT 2 RW 2 Kelurahan Tanah Sareal	1	Set	20.000.000	Pokir	DED
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Posyandu Nusa Indah 1 dan 2 RT 01 RW 01 Kelurahan KEDUNG HALANG	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jl Raya Pemda No 8 RT 05 RW 01 Kelurahan KEDUNG HALANG	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balai Warga RW 06 Jl. Sosiologi RT 2 RW 6 Kelurahan CIPARIGI	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kp. Kramat RT 04/01 Tanah Baru RT 4 RW 1 Kelurahan TANAH BARU	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit

Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Pagu	Pokir / Musrenbang	Ket.
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	POSYANDU Mangga B Jl. Pamikul Bawah RT 002 RW 17 RT 2 RW 17 Kelurahan TEGAL GUNDIL	1	Set	10.000.000	Pokir	Timbangan Bayi
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ANGGREK RT RW 1 Kelurahan SINDANGGRASA	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ASTER RT RW 2 Kelurahan SINDANGGRASA	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	NUSA INDAH 1 RT RW 7 Kelurahan SINDANGGRASA	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	NUSA INDAH 2 RT RW 7 Kelurahan SINDANGGRASA	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KENANGA RT RW 8 Kelurahan SINDANGGRASA	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	MAWAR MERAH RT RW 9 Kelurahan SINDANGGRASA	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	ROS 1 RT RW 10 Kelurahan SINDANGGRASA	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	MAWAR PUTIH RT RW 11 Kelurahan SINDANGGRASA	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	KEMUNING RT RW 12 Kelurahan SINDANGGRASA	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Posyandu di Kelurahan Bantarjati RT 1,2,3,4 RW Kelurahan Bantarjati	1	Set	10.000.000	Pokir	Posyandu Kit
Kebutuhan Anggaran				1.505.600.000		

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Konsep pembangunan Kota Bogor 2019-2024 sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Visi Kota Bogor pada tahun 2019-2024 adalah “**Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga**”. Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup **Kota Bogor** yang mana meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. **Kota Yang Ramah Keluarga** dapat diartikan sebagai berikut :

Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.

Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kota Bogor lima tahun kedepan ditekankan kepada kerjasama antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Demikian juga dari sisi sumber anggaran/ pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD, dana umat, pinjaman, kerjasama dengan badan usaha. Peningkatan pelayanan kesehatan berupa terobosan inovatif guna mempermudah, mempercepat dan meringankan biaya pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah provinsi juga berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat golongan ekonomi lemah / masyarakat miskin.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bogor 2019-2024 terdiri dari 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat yang terkait bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat
 - a. Tujuan
Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang Sehat
 - b. Sasaran
 - 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - 2) Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Strategi
 - 1) Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu,
 - 2) Peningkatan pelayanan kesehatan dalam penanganan Covid-19,
 - 3) Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan promotif serta penyehatan lingkungan

2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas
 - a. Tujuan
Terwujudnya Pemerintah yang Cerdas dan Melayani (*smart government*)
 - b. Sasaran
Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel
 - c. Strategi
Mengembangkan sistem pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada kebijakan Permendagri 18 Tahun 2017, Permendagri 18 Tahun 2020, dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik oleh Pusat maupun Daerah. Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sesuai Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan kebijakan yang ditetapkan adalah :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, dan Program Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2019-2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran Pembangunan	Program
1	Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Terwujudnya Pola Hidup Sehat di Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2	Mewujudkan Kota yang Cerdas	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1	Pembangunan Puskesmas
				2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
				3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (BU DAK)
				4	Pengadaan Obat, Vaksin
				5	Pengadaan Bahan Habis Pakai
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan				
				16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
				17	Pengelolaan Pelayann Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
				18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/atau Berpotensi Bencana				
				19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
				20	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga				
				21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
				22	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
				23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				
				24	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
				25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				
				26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				
				27	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				
				28	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
				30	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
				31	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wajah				
				32	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				
				3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	33	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		
						34	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
						35	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		
				4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
						37	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		
				2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	38	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
								39	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
						6	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	40	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				41	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
				42	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		7	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	8	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		9	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	45	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
				46	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		10	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	47	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		11	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	48	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		12	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	49	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		13	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	50	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	14	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	51	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		15	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		16	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				55	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
		18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				57	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				59	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				60	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				61	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				62	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63	Pengadaan Mebel
				64	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				66	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				68	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
				69	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
23	Peningkatan Pelayanan BLUD	70	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Table 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Bogor

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kota Bogor	60	127.612.819.990	ABPD		55	104.148.016.500
		Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Kota Bogor	2,9		ABPD		2,8	
		Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Kota Bogor	3,1		ABPD		3,0	
		Persentase Balita berstatus gizi normal	Kota Bogor	86,6		ABPD		87	
		Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	Kota Bogor	90		ABPD		90	
		Prevalensi Hipertensi	Kota Bogor	7,9		ABPD		8,4	
		Case Fatality Rate Covid-19	Kota Bogor	1,1		ABPD		1,0	
		Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Kota Bogor	0,13%		ABPD		0,14%	
		Akses sanitasi terhadap air bersih	Kota Bogor	99,6%		ABPD		100%	
		Akses jamban sehat	Kota Bogor	84%		ABPD		86%	
		Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	Kota Bogor	94	ABPD		95		
1.02.02.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Kota Bogor	0,70	37.224.089.170	ABPD		0,72	22.354.250.000
		Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Kota Bogor	85		ABPD		86	
		Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.02.201.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kota Bogor	3	17.035.040.000	ABPD		2	11.500.000.000
1.02.02.201.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Bogor	15	3.200.000.000	ABPD		20	4.000.000.000

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.201.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Bogor	170	7.336.881.820	ABPD		110	95.000.000
1.02.02.201.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kota Bogor	42	1.500.000.000	ABPD		1	3.000.000.000
1.02.02.201.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kota Bogor	28	8.152.167.350	ABPD		1	3.009.250.000
1.02.02.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Kota Bogor	100	88.180.690.720	ABPD		100	80.459.566.500
		Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	Kota Bogor	3600		ABPD		3700	
		Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	Kota Bogor	97		ABPD		98	
		Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	Kota Bogor	94		ABPD		95	
		Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Kota Bogor	55		ABPD		57	
		Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	Kota Bogor	10,00		ABPD		9,9	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Bogor	100		ABPD		100	

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Kota Bogor	100		ABPD		100	
		Prevalensi Covid-19	Kota Bogor	≤ 3,2 %		ABPD		≤ 3,1 %	
		Persentase imunisasi Covid-19	Kota Bogor	70		ABPD		70	
		Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF	Kota Bogor	2		ABPD		3	
1.02.02.202.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	19309	50.000.000	ABPD		19309	200.000.000
1.02.02.202.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	18432	350.000.000	ABPD		18432	199.999.900
1.02.02.202.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	17630	30.000.000	ABPD		17630	200.000.000
1.02.02.202.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	84824	50.000.000	ABPD		84824	200.000.000
1.02.02.202.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	152023	20.000.000	ABPD		152023	200.000.000
1.02.02.202.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	755429	106.986.800	ABPD		755429	763.879.900
1.02.02.202.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	103954	43.000.000	ABPD		103954	199.999.900
1.02.02.202.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	67315	147.500.000	ABPD		71575	196.780.000
1.02.02.202.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Bogor	17402	7.473.178.700	ABPD		17402	54.355.100
1.02.02.202.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Bogor	1465	28.365.000	ABPD		1578	40.814.000

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	19912	41.800.000	ABPD		19888	322.564.799
1.02.02.202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Bogor	24267	105.470.000	ABPD		24267	477.480.700
1.02.02.202.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kota Bogor	1	120.000.000	ABPD		1	200.000.000
1.02.02.202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bogor	1	1.299.320.000	ABPD		1	2.629.150.000
1.02.02.202.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bogor	1	70.000.000	ABPD		1	70.000.000
1.02.02.202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bogor	1	264.562.000	ABPD		1	267.000.000
1.02.02.202.19	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Bogor	8	13.065.770.920	ABPD		1	150.000.000
1.02.02.202.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Bogor	1	5.000.000	ABPD		1	174.550.000
1.02.02.202.21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bogor	1	150.100.000	ABPD		39580	11.600.000
1.02.02.202.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	31664	9.310.000	ABPD		30	32.751.000
1.02.02.202.23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Bogor	25	10.000.000	ABPD		10	250.000.000
1.02.02.202.26	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kota Bogor	9	35.389.000	ABPD		15	62.814.228.500
1.02.02.202.29	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bogor	15	56.730.043.400	ABPD		1	228.000.000
1.02.02.202.34	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Bogor	1	180.000.000	ABPD		1	1.001.250.000
1.02.02.202.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Bogor	55	493.515.000	ABPD		57	7.772.720.000
1.02.02.202.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Bogor	1	7.051.379.900	ABPD		1	652.442.701
1.02.02.202.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Bogor	1	250.000.000	ABPD		1	1.000.000.000

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02.203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health	Kota Bogor	85%	2.155.395.100	ABPD		95%	1.174.200.000
1.02.02.203.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Bogor	1	150.000.000	ABPD		1	18.000.000
1.02.02.203.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Bogor	1	832.050.000	ABPD		1	526.200.000
1.02.02.203.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Kota Bogor	3	1.173.345.100	ABPD		2	630.000.000
1.02.02.204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	Kota Bogor	86%	52.645.000	ABPD		88%	160.000.000
1.02.02.204.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kota Bogor	60	41.645.000	ABPD		60	120.000.000
1.02.02.204.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Bogor	6	11.000.000	ABPD		6	40.000.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Kota Bogor	95	6.323.600.000	ABPD		100	6.810.363.480
		Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	Kota Bogor	92		ABPD		96	
		Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	Kota Bogor	90		ABPD		95	
1.02.03.201	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Kota Bogor	95	3.600.000	ABPD		100	3.600.000
1.02.03.201.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	100	1.800.000	ABPD		100	1.800.000
1.02.03.201.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bogor	150	1.800.000	ABPD		150	1.800.000
1.02.03.202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Dibutuhkan Sesuai dengan Dokumen	Kota Bogor	90	6.020.000.000	ABPD		95	6.104.715.480
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Kota Bogor	0,92		ABPD		0,96	
1.02.03.202.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	26	5.000.000	ABPD		26	30.799.000

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.03.202.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Bogor	225	6.000.000.000	ABPD		225	6.021.576.280
1.02.03.202.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bogor	280	15.000.000	ABPD		280	52.340.200
1.02.03.203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga yang Mendapat Pengembangan Kompetensi	Kota Bogor	275	300.000.000	ABPD		289	702.048.000
1.02.03.203.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kota Bogor	87	300.000.000	ABPD		90	702.048.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	Kota Bogor	86%	698.835.700	ABPD		90%	1.105.877.000
		Persentase Penggunaan Obat Rasional	Kota Bogor	82%		ABPD		83%	
		Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	Kota Bogor	94%		ABPD		96%	
1.02.04.201	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terpenuhinya standar persyaratan perizinan apotek, toko obat dan UMOT	Kota Bogor	75	30.000.000	ABPD		80	215.121.000
1.02.04.201.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Kota Bogor	60	30.000.000	ABPD		75	123.121.000
1.02.04.202	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Usaha produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang bersertifikat	Kota Bogor	16	468.835.700	ABPD		16	30.000.000
1.02.04.202.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	2	23.000.000	ABPD		2	30.000.000
1.02.04.202.02	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Bogor	1	445.835.700	ABPD			

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.04.203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat	Kota Bogor	93,00	30.000.000	ABPD		95,00	581.756.000
1.02.04.203.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Bogor	175	30.000.000	ABPD		175	581.756.000
1.02.04.204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene	Kota Bogor	62	90.000.000	ABPD		63	94.000.000
1.02.04.204.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bogor	1	90.000.000	ABPD		1	94.000.000
1.02.04.205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan	Kota Bogor	56	70.000.000	ABPD		58	170.000.000
1.02.04.205.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bogor	1	70.000.000	ABPD		1	170.000.000
1.02.04.206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	Kota Bogor	10	10.000.000	ABPD		10	15.000.000
1.02.04.206.01	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Bogor	40	10.000.000	ABPD		130	15.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	Kota Bogor	9	12.328.780.000	ABPD		11	8.839.179.000

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Predikat Kota Sehat	Kota Bogor	Swastisaba Wiwerda		ABPD		Swastisaba Wiwerda	
1.02.05.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kota Bogor	40	168.110.000	ABPD		50	289.179.000
1.02.05.201.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bogor	56	168.110.000	ABPD		56	289.179.000
1.02.05.202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber PHBS ≥ target PHBS tingkat kota	Kota Bogor	60	168.110.000	ABPD		70	150.000.000
1.02.05.202.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bogor	4	168.110.000	ABPD		8	150.000.000
1.02.05.203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	Kota Bogor	5.9	11.992.560.000	ABPD		6.0	8.400.000.000
1.02.05.203.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bogor	5	11.992.560.000	ABPD		5	8.400.000.000
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Kota Bogor	3,4	100.379.729.338	ABPD		3,5	184.721.492.721
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	Kota Bogor	A		ABPD		A	327.045.000
1.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	Kota Bogor	A	320.390.000	ABPD		A	327.045.000
1.02.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	6	212.590.000	ABPD		6	210.500.000
1.02.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bogor	6	107.800.000	ABPD		6	116.545.000
1.02.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Kota Bogor	100%	88.305.135.347	ABPD		100%	117.080.750.530
1.02.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	923	86.927.929.347	ABPD		923	114.580.750.530
1.02.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bogor	16	1.377.206.000	ABPD		16	2.500.000.000
1.02.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Kota Bogor	100	5.876.679.835	ABPD		100	7.434.978.765

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	225.503.100	ABPD		1	203.209.000
1.02.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1	480.772.107	ABPD		1	334.593.265
1.02.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Bogor	1	305.477.628	ABPD		1	636.756.500
1.02.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	4	4.095.152.000	ABPD		4	3.692.500.000
1.02.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1	769.775.000	ABPD		1	2.567.920.000
1.02.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Kota Bogor	100%	609.622.149	ABPD		100	750.000.000
1.02.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bogor	132	69.386.900	ABPD		60	200.000.000
1.02.01.207.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	103	540.235.249	ABPD		50	550.000.000
1.02.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bogor	100%	2.394.412.800	ABPD		100%	2.131.864.136
1.02.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	4	1.083.222.648	ABPD		4	851.550.000
1.02.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	4	1.311.190.152	ABPD		4	1.280.314.136
1.02.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	Kota Bogor	100	2.873.489.207	ABPD		100	2.459.097.199
1.02.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	24	551.600.000	ABPD		24	820.200.000
1.02.01.209.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Bogor	1.042	715.700.900	ABPD		1.042	498.897.199
1.02.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	3	1.606.188.307	ABPD		3	1.140.000.000
1.02.01.210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100	2.000.000.000	ABPD		100	54.864.802.091
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	26	2.000.000.000	ABPD		26	54.864.802.091
1.02.01.210	PUSKESMAS BOGOR SELATAN				3.911.942.100	ABPD			4.303.136.310
1.02.01.210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		ABPD		100%	
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.210	PUSKESMAS CIPAKU					3.377.856.570	ABPD	100%	3.715.642.227
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	ABPD				
	1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		
1.02.01.210	PUSKESMAS BONDONGAN					2.927.647.030	ABPD	100%	3.220.411.733
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	ABPD				
	1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		
1.02.01.210	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG					1.778.114.360	ABPD	100%	1.955.925.796
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	ABPD				
	1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		
1.02.01.210	PUSKESMAS BOGOR TIMUR					4.442.747.320	ABPD	100%	4.887.022.052
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	ABPD				
	1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		
1.02.01.210	PUSKESMAS PULO ARMYN					2.371.336.220	ABPD	100%	2.608.469.842
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	ABPD				
	1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		
1.02.01.210	PUSKESMAS BOGOR TENGAH					2.076.837.950	ABPD	100%	2.284.521.745
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	ABPD				
	1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		
1.02.01.210	PUSKESMAS SEMPUR					1.727.993.740	ABPD	100%	1.900.793.114
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	ABPD				
	1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		
1.02.01.210	PUSKESMAS GANG AUT					1.158.835.150	ABPD	100%	1.274.718.665
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	ABPD				

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS BELONG Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	696.070.650	ABPD		100%	765.677.715
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS MERDEKA Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		2.142.434.470	ABPD		
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	ABPD			1	
1.02.01.210	PUSKESMAS SEMPLAK Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	3.173.676.330		ABPD		100%
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS PANCASAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		2.320.587.610	ABPD		100%
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	ABPD			1	
1.02.01.210	PUSKESMAS PASIR MULYA Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	3.153.148.680		ABPD		100%
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS GANG KELOR Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		2.681.203.910	ABPD		100%
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	ABPD			1	
1.02.01.210	PUSKESMAS SINDANG BARANG Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	4.157.694.310		ABPD		100%
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS BOGOR UTARA Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		4.245.476.180	ABPD		100%
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1	ABPD			1	
1.02.01.210	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%	2.436.049.440		ABPD		100%
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	

Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS WARUNG JAMBU				3.072.660.690	ABPD			3.379.926.759
1.02.01.210.01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		ABPD		100%	
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS TANAH SAREAL				2.954.008.090	ABPD			3.249.408.809
1.02.01.210.01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		ABPD		100%	
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT				1.005.242.590	ABPD			1.105.766.849
1.02.01.210.01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		ABPD		100%	
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS KEDUNG BADAQ				2.771.313.820	ABPD			3.048.445.202
1.02.01.210.01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		ABPD		100%	
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS KAYU MANIS				2.705.989.550	ABPD			2.976.588.505
1.02.01.210.01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		ABPD		100%	
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS MEKARWANGI				2.864.136.550	ABPD			3.150.550.205
1.02.01.210.01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		ABPD		100%	
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	PUSKESMAS MULYAHARJA				2.042.443.700	ABPD			2.042.443.700
1.02.01.210.01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		ABPD		100%	
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	
1.02.01.210	LABKESDA				973.635.012	ABPD			1.055.508.289
1.02.01.210.01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bogor	100%		ABPD		100%	
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Bogor	1		ABPD		1	

BAB 5

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (RENJA) merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya akan dijadikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempedomani dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan guna mencapai visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai pada tahun 2023 dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Prinsip-prinsip yang perlu dianut dalam penyusunan rencana kerja antara lain adalah: kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, peningkatan partisipasi masyarakat, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Kemitraan berarti setiap pelaku haruslah dipandang sejajar, tidak ada pihak yang dipandang lebih tinggi atau lebih rendah. Transparansi berarti adanya keterbukaan, secara lebih kongkrit adanya akses untuk mendapatkan informasi yang benar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Akuntabilitas adalah prinsip yang menunjukkan setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Terselenggaranya *good government* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja yang tepat, jelas, terukur dan sah. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Kinerja Dinas Kesehatan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi dan misi serta strategi Dinas Kesehatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2023.

**WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA**